



Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

PERJANJIAN KINERJA

TA . 2025

Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital

ESELON I



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Murtopo Simbolon

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Ekonomi Digital

Airlangga Hartarto

Ali Murtopo Simbolon

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan	1.1	Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	8-9%
		1.2	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	21,7%
		1.3	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	13,07%
2.	Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang Berkualitas	2.1	Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	8,27%
		2.2	Rata-Rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	1,7 Hari
3.	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	3.1	Indeks Literasi Keuangan	57,25
4.	Terwujudnya Kebijakan Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)
6.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	85%

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga
2. Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
3. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional
4. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital
5. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan
6. Peningkatan Layanan Koordinasi Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Anggaran

Rp1.500.000.000,-
Rp3.000.000.000,-
Rp2.000.000.000,-
Rp5.500.000.000,-
Rp4.500.000.000,-
Rp5.300.000.000,-

Total

Rp21.800.000.000,-*

(Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Ekonomi Digital


Airlangga Hartarto


Ali Murtopo Simbolon



Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

PERJANJIAN KINERJA

TA . 2025

- Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga
- Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
- Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional
- Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital
- Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan
- Sekretariat Deputi

ESELON II



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
ASISTEN DEPUTI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
TERTIB NIAGA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismariny

Jabatan : Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ali Murtopo Simbolon

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Ekonomi Digital

Ali Murtopo Simbolon

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Perdagangan Dalam
Negeri, Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga

Ismariny

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN
TERTIB NIAGA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Dalam Negeri	1.1	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera	12,10%
		1.2	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa	13,31%
2.	Terwujudnya Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas	2.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Ritel	80%
		2.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan	80%
3.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas	3.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	3 dari 4
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas	4.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	85%

Kegiatan

- Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Total

Anggaran

Rp. 1.500.000.000,-

Rp. 1.500.000.000,-*

(Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

Pihak kedua,
 Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
 dan Ekonomi Digital



Ali Murtopo Simbolon

Pihak Pertama,
 Asisten Deputi Perdagangan Dalam
 Negeri, Perlindungan Konsumen dan
 Tertib Niaga



Ismariny



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
ASISTEN DEPUTI FASILITASI PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ekko Harjanto

Jabatan : Asisten Deputy Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ali Murtopo Simbolon

Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan
dan Ekonomi Digital

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Fasilitas Perdagangan
dan Pengembangan Ekspor

Ali Murtopo Simbolon

Ekko Harjanto

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI FASILITASI PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional	1.1	Nilai Ekspor Barang Nasional	USD 276,89 Milliar
2.	Terwujudnya Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas	2.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor	80%
		2.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengendalian Impor	80%
		2.3	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan	80%
3.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas	3.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	3 dari 4 (Baik)
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas	4.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	85%

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Total

Anggaran

Rp. 3.000.000.000,-

Rp. 3.000.000.000,-*
(Tiga Miliar Rupiah)


Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Ekonomi Digital,

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan
dan Pengembangan Ekspor



Ali Murtopo Simbolon



Ekko Harjanto



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pujo Setio

Jabatan : Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ali Murtopo Simbolon

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan
Ekonomi Digital

Ali Murtopo Simbolon

Pihak Pertama,
Plt. Asisten Deputi
Pengembangan Logistik Nasional

Pujo Setio

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas	1.1. Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB	3,58%
		1.2. Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1,3 – 1,8 (hari)
		1.3. Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1,3 – 1,8 (hari)
2	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas	2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut	80%
		2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak	80%
3	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional	3 dari 4 (Baik)
4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas	4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional	85%

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional

Total

Anggaran

Rp. 2.000.000.000,-

Rp. 2.000.000.000,-*
(Dua Miliar Rupiah)

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital



Ali Murtopo Simbolon

Pihak Pertama,
Plt. Asisten Deputi Pengembangan
Logistik Nasional



Pujo Setio



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Theodore Sutarto

Jabatan : Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ali Murtopo Simbolon

Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan
Ekonomi Digital

Ali Murtopo Simbolon

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Pengembangan
Ekonomi Digital

Theodore Sutarto

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan	1.1. Jumlah Volume Transaksi <i>E-Commerce</i>	2,4 miliar Faktur Transaksi
		1.2 Persentase Penyelesaian <i>Legal Drafting</i> DEFA	100%
2	Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Digital yang Berkualitas	2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi	80%
		2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA	80%
3	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)
4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas	4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	85%

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital

Anggaran

Rp 5.500.000.000

Total

Rp 5.500.000.000*

(Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Ekonomi Digital

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Pengembangan
Ekonomi Digital



Ali Murtopo Simbolon



Theodore Sutarto



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erdiriyo

Jabatan : Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ali Murtopo Simbolon

Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak kedua,
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Ekonomi Digital

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Peningkatan Inklusi
Keuangan

Ali Murtopo Simbolon

Erdiriyo

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	1.1	Tingkat Literasi Keuangan Konvensional	57%
		1.2	Tingkat Literasi Keuangan Syariah	39%
2.	Terwujudnya Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan yang Berkualitas	2.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan	80%
		2.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah	80%
3.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas	3.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	3 dari 4 (Baik)
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas	4.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	85%

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan

Total

Anggaran

Rp. 4.500.000.000,-

Rp. 4.500.000.000,-*

(Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Ekonomi Digital,

Ali Murtopo Simbolon

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi
Keuangan

Erdiriyo



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pujo Setio

Jabatan : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ali Murtopo Simbolon

Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Ekonomi Digital

Ali Murtopo Simbolon

Pihak Pertama,
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital

Pujo Setio

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital yang Baik	1.1	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital	100%
		1.2	Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital	100%
		1.3	Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital	100%
		1.4	Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital	100%
		1.5	Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy	100%
		1.6	Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital	85%
		1.7	Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital	3 dari 4

Kegiatan

1. Peningkatan Layanan Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital

Total

Anggaran

Rp. 5.300.000.000,-

Rp. 5.300.000.000,-*

(Lima Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah)

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN
dan Ekonomi Digital



Ali Murtopo Simbolon

Pihak Pertama,
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi
PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital



Pujo Setio



Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

RENCANA AKSI

TA . 2025

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

ESELON II

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan	1.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	8-9%	Optimalisasi pelaksanaan strategi pengembangan ekonomi digital	Pengumpulan data dan informasi terkait isu/permasalahan terkait e-commerce	Penyelesaian isu/permasalahan terkait e-commerce	Monitoring dan Evaluasi isu/permasalahan terkait e-commerce	1. Tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi High Level Meeting isu/permasalahan terkait e-commerce 2. Monitoring dan Evaluasi jumlah volume transaksi e-commerce sebagai proyeksi pengukuran ekonomi digital terhadap PDB 3. Perencanaan kegiatan Pengembangan Ekonomi Digital tahun 2026
		1.2 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	21,7%	Optimalisasi pelaksanaan strategi peningkatan ekspor barang dan jasa	a. Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Permendag No 8 Tahun 2024 b. Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Permendag No 23 Tahun 2023	Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Kebijakan DHE-SDA	Koordinasi Evaluasi Implementasi Pelaksana dan Kelompok Kerja Satgas Peningkatan Ekspor Nasional	a. Tindak Lanjut Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Permendag No 8 Tahun 2024 b. Tindak Lanjut Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Permendag No 23 Tahun 2023 c. Perencanaan kegiatan Pengembangan Ekspor tahun 2026
		1.3 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	13,07 %	Optimalisasi pelaksanaan strategi peningkatan perdagangan besar dan eceran	a. Pengumpulan data dan informasi terkait isu/permasalahan Pencapaian Target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB b. Monitoring Kegiatan Pelaksanaan Program Belanja Masyarakat (BINA dan Launching Friday Mubarak)	a. Penyelesaian Kendala Pencapaian Target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB b. Monitoring Kegiatan Pelaksanaan Program Belanja Masyarakat	a. Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Kendala Pencapaian Target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB b. Tindak Lanjut Monitoring Kegiatan Pelaksanaan Program Belanja Masyarakat	a. Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Penyelesaian Kendala Pencapaian Target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB b. Monitoring Kegiatan Pelaksanaan Program Belanja Masyarakat c. Perencanaan kegiatan Perdagangan Dalam Negeri tahun 2026

2	Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang Berkualitas	2.2 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	8,27%	Optimalisasi pelaksanaan strategi pencapaian sasaran biaya transportasi logistik	Pengumpulan data dan informasi terkait Pengembangan Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel untuk Efisiensi Biaya Logistik	Penyelesaian isu/permasalahan terkait Pengembangan Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel untuk Efisiensi Biaya Logistik	Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Pengembangan Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel untuk Efisiensi Biaya Logistik	a. Tindak Lanjut Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Pengembangan Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel untuk Efisiensi Biaya Logistik b. Perencanaan kegiatan pengembangan logistik tahun 2026
		2.1 Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	1,7 Hari	Optimalisasi pelaksanaan strategi pencapaian sasaran rata-rata waktu perputaran di pelabuhan	Pengumpulan data dan informasi terkait Standarisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas	Pengumpulan data dan informasi terkait Standarisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas	Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Standarisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas	Monitoring Evaluasi Standarisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas
3	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	3.1 Indeks Literasi Keuangan	57,25	Optimalisasi pelaksanaan strategi peningkatan literasi keuangan	Pengumpulan data dan informasi terkait peningkatan indeks literasi keuangan	Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting peningkatan indeks literasi keuangan	Tindak Lanjut Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting peningkatan indeks literasi keuangan	Perencanaan kegiatan peningkatan indeks literasi keuangan tahun 2026
4	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang efektif	a. Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait kegiatan Pengendalian Impor b. Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi	a. Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor b. Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan c. Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi	a. Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel b. Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait Perdagangan Ritel	a. Monitoring Evaluasi kebijakan terkait pelaksanaan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan b. Koordinasi dan Monitoring Evaluasi High Level Meeting kebijakan terkait dengan Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan
5	Terwujudnya penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	5.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)	Terpenuhinya seluruh layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada stakeholder demi terciptanya kebijakan yang berkualitas	Memberikan arahan penyusunan kuesioner pengukuran Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I	Memberikan arahan pelaksanaan Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I	a. Memberikan arahan tindak lanjut hasil Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I b. Memberikan arahan Persiapan Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II	Memberikan arahan pelaksanaan Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II

6	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	6.1 Persentase Pelaksanaan RB Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	85%	1. Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (ZI) 2. Nilai SAKIP 3. Tingkat Digitalisasi Arsip	a. Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja b. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan c. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	a. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan b. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	a. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan b. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	a. Fasilitas Pembangunan ZI di Unit Kerja (TW IV) b. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan c. Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026 d. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI
---	---	--	-----	---	--	--	--	--

Jakarta, Januari 2025
Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital,

Ali Murtopo



Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

RENCANA AKSI

TA . 2025

- Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga
- Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
- Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional
- Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital
- Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan
- Sekretariat Deputi

ESELON II

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera	12,10%	Penguatan monitoring realisasi Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera	Identifikasi kendala pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera	Rapat Koordinasi penyelesaian kendala pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera	Rapat Koordinasi penyelesaian kendala pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera Perencanaan Kegiatan Penanganan Isu di Tahun 2026.
				Koordinasi Pelaksanaan Program Belanja Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan program belanja BINA dan Harbolnas Tahun 2024 Koordinasi persiapan pelaksanaan program BINA Ramadhan di Pulau Sumatera. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan program belanja BINA Ramadhan di Pulau Sumatera Koordinasi persiapan pelaksanaan program BINA Back to School di Pulau Sumatera 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan program belanja BINA Back to School di Pulau Sumatera Persiapan pelaksanaan program belanja BINA Akhir Tahun di Pulau Sumatera 	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan evaluasi program belanja masyarakat tahun 2025 di Pulau Sumatera Identifikasi awal program belanja masyarakat tahun 2026

							<ul style="list-style-type: none"> Persiapan pelaksanaan program Harbolnas di Pulau Sumatera 	<ul style="list-style-type: none"> di Pulau Sumatera Perencanaan Kegiatan Penanganan Isu di Tahun 2026.
		Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa	13,31%	Penguatan monitoring realisasi Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kendala pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi penyelesaian kendala pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi penyelesaian kendala pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa Perencanaan Kegiatan Penanganan Isu di Tahun 2026.
				Koordinasi Pelaksanaan Program Belanja Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan program belanja BINA dan Harbolnas Tahun 2024 Koordinasi persiapan pelaksanaan program BINA Ramadhan di Pulau Jawa. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan program belanja BINA Ramadhan di Pulau Jawa Koordinasi persiapan pelaksanaan program BINA Back to School di Pulau Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan program belanja BINA Back to School di Pulau Jawa Persiapan pelaksanaan program belanja BINA Akhir Tahun di Pulau Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan evaluasi program belanja masyarakat tahun 2025 di Pulau Jawa Identifikasi awal program belanja masyarakat tahun 2026

							<ul style="list-style-type: none"> Persiapan pelaksanaan program Harbolnas di Pulau Jawa 	di Pulau Jawa <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Kegiatan Penanganan Isu di Tahun 2026.
2	Terwujudnya Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Ritel	80%	Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait Pengembangan Usaha Ritel	Identifikasi permasalahan terkait Pengembangan Usaha Ritel	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel	Rapat koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel Perencanaan Kegiatan Penanganan Isu di Tahun 2026.
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan	80%	Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan	Identifikasi permasalahan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan	Rapat koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan Perencanaan Kegiatan Penanganan Isu di Tahun 2026.
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Layanan Sinkronisasi,	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di	3 dari 4 (Baik)	Terpenuhinya seluruh layanan koordinasi, sinkronisasi, dan	Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan

	Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas	Bidang Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga		pengendalian kepada stakeholder demi terciptanya kebijakan yang berkualitas	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Semester I	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Semester I	Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Semester I <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Semester II 	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Semester II
--	--	---	--	---	---	---	--	--

4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	85 %	1.Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai 2.Tingkat Maturitas SPIP 3.Nilai SAKIP 4.Indeks Perencanaan Pembangunan 5.Tingkat Digitalisasi Arsip	- Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan - Penyusunan Renja 2026 - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan - Penyusunan Revisi Renja 2025 - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	- Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja - Penyusunan matriks manajemen risiko - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan - Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2025 - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan - Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026 - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI
---	---	---	------	--	---	--	--	--

Jakarta, Januari 2025
Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri,
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 


Ismariny

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI FASILITASI PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional	Nilai Ekspor Barang Nasional	USD 276,89 Milliar	Optimalisasi Kebijakan Peningkatan Ekspor	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor untuk Komoditas sektor Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keppres dan Kepmenko terkait Satgas Peningkatan Ekspor Nasional	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor untuk Komoditas sektor Pertambangan dan Migas serta Industri Manufaktur	Evaluasi Implementasi Kebijakan Peningkatan Ekspor
				Evaluasi Kebijakan Pemberlakuan Lartas Ekspor dan Impor	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Evaluasi Implementasi Permendag No 8 Tahun 2024 • Koordinasi Evaluasi Implementasi Permendag Nomor 23 Tahun 2023 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Evaluasi Implementasi Permendag No 8 Tahun 2024 • Koordinasi Evaluasi Implementasi Permendag Nomor 23 Tahun 2023 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Evaluasi Implementasi Permendag No 8 Tahun 2024 • Koordinasi Evaluasi Implementasi Permendag Nomor 23 Tahun 2023 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rekomendasi atas Evaluasi Implementasi Kebijakan Lartas Impor • Penyusunan Evaluasi Implementasi Kebijakan Lartas Ekspor •
				Implementasi Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE-SDA)	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan DHE-SDA	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan DHE-SDA	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan DHE-SDA	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan DHE-SDA
				Optimalisasi Dashboard Ekspor dan Impor	Rapat Koordinasi Pembentukan Dashboard Ekspor dan Impor	Koordinasi Pengelolaan Data pada Dashboard Ekspor dan Impor	Rapat Koordinasi Penerapan dan Pemanfaatan Dashboard Ekspor dan Impor	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Dashboard Ekspor dan Impor

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				Optimalisasi Indonesia <i>Single Risk Management</i> (ISRM) dalam Penerbitan Perizinan Ekspor dan Impor	Evaluasi Penerapan ISRM pada Kementerian/ Lembaga	Rapat Koordinasi Penerapan ISRM pada Kementerian/ Lembaga	Rapat Koordinasi Penerapan ISRM pada Kementerian/ Lembaga	Monitoring dan Evaluasi Penerapan ISRM pada Kementerian/ Lembaga
2	Terwujudnya Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor	80%	Rekomendasi Kebijakan yang dikeluarkan terkait Pengembangan Ekspor	Identifikasi permasalahan terkait Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekspor	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait Pengembangan Ekspor	Penyusunan rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil terkait Pengembangan Ekspor	Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait Pengembangan Ekspor
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengendalian Impor	80%	Rekomendasi Kebijakan yang Dikeluarkan terkait Pengendalian Impor	Identifikasi permasalahan terkait Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Impor	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait kegiatan Pengendalian Impor	Penyusunan rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil terkait kegiatan Pengendalian Impor	Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait pelaksanaan Pengendalian Impor
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan	80%	Rekomendasi Kebijakan yang Dikeluarkan terkait Penyederhanaan Prosedur Perdagangan	Identifikasi permasalahan terkait Pelaksanaan kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan	Penyusunan rekomendasi kebijakan/ rancangan kebijakan yang akan diambil terkait kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan	Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait pelaksanaan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronisasi	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan	3 dari 4 (Baik)	Terpenuhinya seluruh layanan koordinasi, sinkronisasi, dan	• Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan	• Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi,	• Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan	• Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi,

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
	dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas	Pengendalian di Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor		pengendalian kepada <i>stakeholder</i> demi terciptanya kebijakan yang berkualitas	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Semester I	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Semester II
4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	85	Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai			• Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	
				Tingkat Maturitas SPIP			• Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	
				Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I 	• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II	• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV • Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026
				Indeks Perencanaan Pembangunan	• Penyusunan Renja 2025	• Penyusunan Revisi Renja 2025	• Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2025	
				Indeks Kualitas Kebijakan			• Penyusunan Bukti Dukung	
				Capaian Prioritas Nasional	• Monitoring capaian kinerja	• Monitoring capaian kinerja	• Monitoring capaian kinerja Rincian	• Monitoring capaian kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan I Tahun 2025	Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan II Tahun 2025	Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan III Tahun 2025	Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan IV Tahun 2025
				Tingkat Digitalisasi Arsip	• Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	• Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	• Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	• Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI

Jakarta, Januari 2025
Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor



Ekko Harjanto

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas	Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB	3,58%	Pengembangan konektivitas jalan dan perbaikan tata kelola layanan transportasi darat dan laut	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi pembahasan konektivitas jalan dan perbaikan tata kelola layanan transportasi darat selain rel dan angkutan rel Monitoring dan evaluasi pengembangan konektivitas jalan untuk efisiensi biaya logistik angkutan darat selain rel dan angkutan rel 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi konektivitas jalan dan perbaikan tata kelola layanan transportasi darat selain rel dan angkutan rel Rapat koordinasi pembahasan konektivitas jalan dan perbaikan tata kelola layanan transportasi untuk efisiensi biaya logistik angkutan sungai danau dan penyeberangan dan angkutan laut 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pengembangan konektivitas jalan untuk efisiensi biaya logistik angkutan sungai danau dan penyeberangan dan angkutan laut Rapat tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk efisiensi biaya logistik angkutan sungai danau dan penyeberangan dan angkutan laut 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan pelaksanaan pengembangan konektivitas jalan dan perbaikan tata kelola layanan transportasi darat dan laut Perencanaan Kegiatan Penanganan Isu di Tahun 2026

		Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1,3 – 1,8 (hari)	Standarisasi fasilitas pelabuhan dan terminal peti kemas di Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi pembahasan peningkatan kinerja pelabuhan dan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok • Monitoring dan evaluasi kinerja pelabuhan dan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pelabuhan dan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok • Rapat koordinasi pembahasan standarisasi fasilitas pelabuhan dan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi standarisasi fasilitas pelabuhan dan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok • Rapat tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi standarisasi fasilitas pelabuhan dan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan pelaksanaan pengembangan kebijakan peningkatan kinerja dan standarisasi pelabuhan dan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok • Perencanaan Kegiatan Penanganan Isu di Tahun 2026
		Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1,3 – 1,8 (hari)	Standarisasi fasilitas pelabuhan dan terminal peti kemas di Tanjung Perak	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi pembahasan peningkatan kinerja pelabuhan dan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak • Monitoring dan evaluasi kinerja pelabuhan dan terminal peti kemas di 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pelabuhan dan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak • Rapat koordinasi pembahasan standarisasi fasilitas pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi standarisasi fasilitas pelabuhan dan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak • Rapat tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi standarisasi fasilitas pelabuhan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan pelaksanaan pengembangan kebijakan peningkatan kinerja dan standarisasi pelabuhan dan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak • Perencanaan Kegiatan Penanganan

					Pelabuhan Tanjung Perak	dan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak	terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak	Isu di Tahun 2026
2	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut	80%	Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi permasalahan terkait akses jalan dari pusat produksi/distribusi menuju pelabuhan dan sebaliknya • Identifikasi permasalahan terkait pengembangan atau peningkatan kapasitas pelabuhan sebagai simpul utama konektivitas logistik 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan penyediaan akses jalan dari pusat produksi/distribusi menuju pelabuhan dan sebaliknya • Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan pengembangan atau peningkatan kapasitas pelabuhan sebagai simpul utama konektivitas logistik 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan penyediaan akses jalan dari pusat produksi/distribusi menuju pelabuhan dan sebaliknya • Rapat koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan atau peningkatan kapasitas pelabuhan sebagai simpul utama konektivitas logistik 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan penyediaan akses jalan dari pusat produksi/distribusi menuju pelabuhan dan sebaliknya • Monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan pengembangan atau peningkatan kapasitas pelabuhan sebagai simpul utama konektivitas logistik • Rapat koordinasi tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

								<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Kegiatan Penanganan Isu di Tahun 2026
		<p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak</p>	80%	<p>Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi permasalahan terkait layanan digitalisasi aktivitas bongkar muat peti kemas Identifikasi permasalahan terkait sarana pendukung kerja bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait optimalisasi layanan digital aktivitas bongkar muat peti kemas Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait revitalisasi/standarisasi sarana pendukung kerja bongkar muat 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi penyusunan dan/atau penetapan rekomendasi kebijakan optimalisasi layanan digital aktivitas bongkar muat peti kemas Rapat koordinasi penyusunan dan/atau penetapan rekomendasi kebijakan revitalisasi/standarisasi sarana pendukung kerja bongkar muat peti kemas 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan optimalisasi layanan digital aktivitas bongkar muat peti kemas Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan revitalisasi/standarisasi sarana pendukung kerja bongkar muat peti kemas Rapat koordinasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan Perencanaan Kegiatan Penanganan

								Isu di Tahun 2026
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional	3 dari 4 (Baik)	Terpenuhinya seluruh layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada stakeholder demi terciptanya kebijakan yang berkualitas	Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional Semester I	<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional Semester I Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional Semester II 	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional Semester II

4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional	85%	1.Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai 2.Tingkat Maturitas SPIP 3.Nilai SAKIP 4.Indeks Perencanaan Pembangunan 5.Capaian Prioritas Nasional (K/L) 6.Tingkat Digitalisasi Arsip	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I • Penyusunan Renja 2026 • Monitoring Capaian Kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan I • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI Triwulan I 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II • Penyusunan Revisi Renja 2025 • Monitoring Capaian Kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan II • Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi Triwulan II 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja • Penyusunan Matriks Manajemen Risiko • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III • TOR Dan RAB Atas Revisi Renja 2025 • Monitoring Capaian Kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan III • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI Triwulan III 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV • Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026 • Monitoring Capaian Kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan IV • Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi Triwulan IV
---	--	---	-----	--	--	--	--	--

Jakarta, 2 Januari 2025

Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Pujo Setio

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan	1.1. Jumlah volume transaksi e-commerce	2,4 miliar faktur transaksi	Koordinasi kebijakan atau regulasi di bidang e-commerce, meliputi iklim bisnis, tata kelola data, serta pelaksanaan kerja sama terkait ekonomi digital	1. Koordinasi, serta pengumpulan data dan informasi terkait identifikasi isu/ permasalahan, serta pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi e-commerce.	1. Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi e-commerce.	1. Koordinasi penyelesaian Monitoring dan evaluasi isu/permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi e-commerce. 2. Monitoring penyelesaian isu/permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi e-commerce.	1. Monitoring dan evaluasi jumlah volume transaksi e-commerce. 2. Perencanaan kegiatan tahun 2026
		1.2. Persentase Penyelesaian Legal Drafting DEFA	100%	Koordinasi dan Penyampaian Posisi Indonesia dalam Perundingan Digital Economy Framework Agreement (DEFA)	1. Menghadiri rangkaian perundingan DEFA Ke-9 dan Ke-10 dalam rangka penyampaian posisi Indonesia. 2. Melaksanakan relay perundingan DEFA. 3. Pelaporan proses legal drafting DEFA pada Deputi dan/atau pimpinan terkait.	1. Menghadiri rangkaian perundingan DEFA dalam rangka penyampaian posisi Indonesia. 2. Melaksanakan relay perundingan DEFA. 3. Pemantauan capaian proses legal drafting dan strategi pencapaian kesepakatan 4. Pelaporan proses legal drafting DEFA pada Deputi dan/atau pimpinan terkait.	1. Menghadiri rangkaian perundingan DEFA dalam rangka penyampaian posisi Indonesia. 2. Melaksanakan relay perundingan DEFA. 3. Pelaporan proses legal drafting DEFA pada Deputi dan/atau pimpinan terkait.	1. Mengakomodir pelaksanaan rangkaian perundingan DEFA Ke-14 2. Menghadiri rangkaian perundingan DEFA dalam rangka penyampaian posisi Indonesia. 3. Melaksanakan relay perundingan DEFA. 4. Pemantauan capaian proses legal drafting dan strategi pencapaian kesepakatan 5. Pelaporan proses legal drafting DEFA pada Deputi dan/atau pimpinan terkait.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital yang Efektif	2.1. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi	80%	Koordinasi Pelaksanaan Inisiatif Strategis dalam Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia	1. Persiapan koordinasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi 2. Rapat koordinasi dan pertemuan ASEAN Committee on Electronic Commerce and Digital Economy (ACCED), akses OECD, AANZFTA, dan/atau forum di tingkat internasional lainnya 3. <i>Monitoring</i> dan evaluasi kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi	1. Koordinasi dan sinkronisasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi 2. Rapat koordinasi dan pertemuan ASEAN Committee on Electronic Commerce and Digital Economy (ACCED), akses OECD, AANZFTA, dan/atau forum di tingkat internasional lainnya 3. <i>Monitoring</i> dan evaluasi kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi	1. Koordinasi dan sinkronisasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi 2. Rapat koordinasi dan pertemuan ASEAN Committee on Electronic Commerce and Digital Economy (ACCED), akses OECD, AANZFTA, dan/atau forum di tingkat internasional lainnya 3. <i>Monitoring</i> dan evaluasi kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi	1. Rapat koordinasi dan pertemuan ASEAN Committee on Electronic Commerce and Digital Economy (ACCED), akses OECD, AANZFTA, dan/atau forum di tingkat internasional lainnya 2. <i>Monitoring</i> dan evaluasi kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi 3. Perencanaan kegiatan tahun 2026
		2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA	80%	Koordinasi domestik dengan K/L terkait	1. Rapat koordinasi penyiapan posisi runding RI untuk DEFA Ke-9 dan Ke-10 dengan K/L terkait 2. Penyusunan matriks masukan K/L dan kertas posisi untuk DEFA Ke-9 dan Ke-10	1. Rapat koordinasi penyiapan posisi runding RI untuk DEFA Ke-11 dan Ke-12 dengan K/L terkait 2. Penyusunan matriks masukan K/L dan kertas posisi untuk DEFA Ke-11 dan Ke-12	1. Rapat koordinasi penyiapan posisi runding RI untuk DEFA Ke-13 dengan K/L terkait 2. Penyusunan matriks masukan K/L dan kertas posisi untuk DEFA Ke-13	1. Rapat koordinasi penyiapan posisi runding RI untuk DEFA Ke-14 dengan K/L terkait 2. Penyusunan matriks masukan K/L dan kertas posisi untuk DEFA Ke-14

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital	3.1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)	Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital	1. Penyiapan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital	1. Pelaksanaan survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital Semester 1 2. Pelaporan hasil survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital Semester 1 3. Evaluasi hasil survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital Semester 1	1. Pelaksanaan tindak lanjut evaluasi hasil survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital Semester 1 2. Penyiapan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital 3. Evaluasi hasil survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital Semester 1	1. Pelaksanaan survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital Semester 2 2. Pelaporan hasil survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital Semester 2 3. Evaluasi hasil survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital Semester 2
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas	4.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	85%	1. Tingkat capaian kebijakan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai 2. Tingkat maturitas SPIP 3. Nilai SAKIP 4. Indeks Perencanaan Pembangunan 5. Tingkat digitalisasi arsip	1. Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, rencana aksi dan manual IKU, 2. Penyusunan laporan kinerja triwulanan 3. Penyusunan Renja Tahun 2026 4. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	1. Penyusunan laporan kinerja triwulanan 2. Penyusunan Revisi Renja Tahun 2025 3. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	1. Penyusunan dan penetapan tim kerja 2. Penyusunan marriks manajemen risiko 3. Penyusunan laporan kinerja triwulanan 4. Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2025 5. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	1. Penyusunan laporan kinerja triwulanan 2. Penyusunan <i>draft</i> perjanjian kinerja tahun 2026 3. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

Jakarta, Januari 2025
Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital,



Theodore Sutarto

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	Tingkat Literasi Keuangan Konvensional	57%	Peningkatan Indeks Literasi Keuangan Konvensional pada Segmen Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi awal peningkatan literasi keuangan konvensional bagi segmen prioritas - Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi teknis dan monitoring pelaksanaan peningkatan literasi keuangan konvensional bagi segmen prioritas pada Semester I - Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi teknis dan monitoring peningkatan literasi keuangan konvensional bagi segmen prioritas - Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi teknis dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan peningkatan literasi keuangan konvensional bagi segmen prioritas pada Semester II - Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan konvensional - Identifikasi Isu dan Perencanaan untuk Tahun 2026
		Tingkat Literasi Keuangan Syariah	39%	Peningkatan Indeks Literasi Keuangan Syariah pada Segmen Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi awal peningkatan literasi keuangan syariah bagi segmen prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi teknis dan monitoring pelaksanaan peningkatan literasi keuangan syariah bagi segmen 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi teknis dan monitoring i pelaksanaan peningkatan literasi keuangan syariah bagi 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi teknis dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan peningkatan literasi keuangan syariah bagi

					- Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan syariah	prioritas pada Semester I - Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan syariah	segmen prioritas Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan syariah	segmen prioritas pada Semester II - Sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan syariah - Identifikasi Isu dan Perencanaan untuk Tahun 2026
2	Terwujudnya Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan	80%	Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan	Identifikasi permasalahan terkait: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal dan Digital • Peningkatan Literasi Keuangan dan perlindungan konsumen, • Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil, 	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal dan Digital • Peningkatan Literasi Keuangan dan perlindungan konsumen, • Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil, 	Rapat koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan terkait: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal dan Digital • Peningkatan Literasi Keuangan dan perlindungan konsumen, • Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil, 	- Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal dan Digital • Peningkatan Literasi Keuangan dan perlindungan konsumen, • Penguatan akses permodalan

					<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan regulasi terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan regulasi terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan regulasi terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan 	<p>an dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan regulasi terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan <p>- Identifikasi Isu dan Perencanaan untuk Tahun 2026</p>
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah	80%	Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah	<p>Identifikasi permasalahan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal dan Digital • Peningkatan Literasi Keuangan 	<p>Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal dan Digital • Peningkatan Literasi 	<p>Rapat koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan terkait Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal dan Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Literasi Keuangan 	<p>- Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal dan Digital

					<p>dan perlindungan konsumen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil, • Penyusunan regulasi terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan 	<p>Keuangan dan perlindungan konsumen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil, • Penyusunan regulasi terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan 	<p>dan perlindungan konsumen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil, • Penyusunan regulasi terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Literasi Keuangan dan perlindungan konsumen, • Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil, • Penyusunan regulasi terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan <p>- Identifikasi Isu dan Perencanaan untuk Tahun 2026</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	---

3	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	3 dari 4 (Baik)	Terpenuhinya seluruh layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada <i>stakeholder</i> demi terciptanya kebijakan yang berkualitas	Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan	Tindak lanjut TW II dan Persiapan Survei ke-2 Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan
4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	85 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai 2. Tingkat Maturitas SPIP 3. Nilai SAKIP 4. Indeks Perencanaan Pembangunan 5. Capaian Prioritas Nasional (K/L) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan • Penyusunan Renja 2026 • Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional setiap 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan • Penyusunan Revisi Renja 2025 • Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional setiap triwulan pada tahun 2025 • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja • Penyusunan matriks manajemen risiko • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan • Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2025 • Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan • Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026 • Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional setiap triwulan pada tahun 2025 • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

				6. Tingkat Digitalisasi Arsip	triwulan pada tahun 2025 <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI 		Nasional setiap triwulan pada tahun 2025 <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI 	
--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

Jakarta, 3 Januari 2025
 Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan



Erdiriyo

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

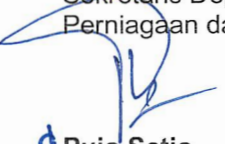
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital yang Baik	1.1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital	100%	1. Rencana Aksi Pembangunan RB General 2. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai 3. Tingkat Maturitas SPIP 4. Nilai SAKIP 5. Indeks Perencanaan Pembangunan 6. Tingkat Digitalisasi Arsip 7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 8. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) 9. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 10. Indeks Tata Kelola Pengadaan 11. Indeks Sistem Merit 12. Capaian IKU 13. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan) 14. Survei Penilaian Integritas (SPI) 15. Indeks BerAKHLAK	a. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian, Rencana Aksi dan Manual IKU b. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan c. Penyusunan Renja 2026 d. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI e. Monev realisasi anggaran f. Penyusunan RPD g. Monev pencatatan SIRUP h. Monev pemanfaatan aplikasi e-kinerja BKN i. Penyusunan bahan LOM j. Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK	a. Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP b. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan c. Penyusunan usulan atas Rancangan Renstra Kemenko Perekonomian d. Penyusunan Revisi Renja 2025 e. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI f. Monev realisasi anggaran g. Penyusunan RPD h. Penyusunan hasil tindaklanjutan laporan hasil pemantauan SP4N-LAPOR! i. Penyusunan bahan LOM j. Pemenuhan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK k. Koordinasi hasil rekomendasi BPK l. Penyampaian usulan data responden internal dan eksternal m. Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK n. Koordinasi pengusulan Agen Perubahan	a. Pemetaan Rencana Aksi RB Tematik 2025 b. Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja c. Penyusunan Matriks Manajemen Risiko d. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan e. Fasilitasi evaluasi SAKIP Eselon I f. Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2025 g. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI h. Monev realisasi anggaran i. Penyusunan RPD j. Penyusunan Bukti Dukung IKK k. Penyusunan bahan LOM l. Sosialisasi pengisian SPI m. Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK n. Fasilitasi evaluasi pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan	a. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan b. Fasilitasi evaluasi AKIP Eselon I c. Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026 d. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI e. Monev realisasi anggaran f. Implementasi LLAT g. Penyusunan RPD h. Penyusunan hasil tindaklanjutan laporan hasil pemantauan SP4N-LAPOR! i. Pengisian SIRUP j. Monev pencatatan SIRUP k. Penyusunan usulan formasi ASN l. Penyusunan bahan LOM m. Koordinasi hasil rekomendasi BPK n. Sosialisasi pengisian SPI o. Dukungan publikasi konten dan penggunaan logo BerAKHLAK p. Fasilitasi evaluasi pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan
		1.1. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital	100%	Terwujudnya tata kelola Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital yang efektif dan efisien	a. Monitoring dokumen pengelolaan kinerja b. Mengelola ketatausahaan dan sistem informasi c. Melaksanakan dukungan administrasi kepegawaian d. Menyiapkan pengadaan barang dan jasa e. Persiapan penyusunan	a. Monitoring dokumen pengelolaan kinerja b. Mengelola ketatausahaan dan sistem informasi c. Melaksanakan dukungan administrasi kepegawaian d. Menyiapkan pengadaan barang dan jasa	a. Monitoring dokumen pengelolaan kinerja b. Mengelola ketatausahaan dan sistem informasi c. Melaksanakan dukungan administrasi kepegawaian d. Menyiapkan pengadaan barang dan jasa e. Penilaian pengawasan	a. Monitoring dokumen pengelolaan kinerja b. Mengelola ketatausahaan dan sistem informasi c. Melaksanakan dukungan administrasi kepegawaian d. Menyiapkan pengadaan barang dan jasa e. Evaluasi penilaian

					standar operasional (SOP)	e. Penguatan persiapan pengawasan kearsipan internal f. Perencanaan standar operasional (SOP)	kearsipan internal f. Pelaksanaan standar operasional (SOP)	pengawasan kearsipan internal f. Evaluasi standar operasional (SOP)
		1.2. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	100%	Terlaksananya perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang efektif	a. Penyusunan PK, Manual IKU dan Rencana Aksi b. Menyusun dokumen pengelolaan program, anggaran dan keuangan b. Monitoring penyerapan anggaran terhadap Pagu DIPA c. Monitoring target capaian output d. Monitoring revisi anggaran dan/atau POK	a. Monitoring penyerapan anggaran terhadap Pagu DIPA b. Monitoring target capaian output c. Monitoring revisi anggaran dan/atau POK d. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah TA 2026 e. Penyusunan Rancangan TOR dan RAB TA 2026	a. Monitoring penyerapan anggaran terhadap pagu DIPA b. Monitoring target capaian output c. Monitoring revisi anggaran dan/atau POK d. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Deputy	a. Monitoring penyerapan anggaran terhadap pagu DIPA b. Monitoring target capaian output c. Monitoring revisi anggaran dan/atau POK d. Monitoring Pagu minus e. Penyesuaian Rancangan TOR dan RAB TA 2026
		1.3. Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	100%	Terwujudnya kepatuhan pelaporan di unit Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	a. Monitoring pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan b. Menyiapkan bahan publikasi media Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital c. Optimalisasi pengelolaan data kinerja sistem kinerja ekon-GO d. Persiapan pelaporan E-Monev e. Pelaporan capaian kinerja individu (SKP) triwulan I f. Penyusunan laporan capaian kinerja triwulan I	a. Optimalisasi pengelolaan data kinerja sistem kinerja ekon-GO b. Menyiapkan bahan publikasi media Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital c. Pelaporan capaian kinerja individu (SKP) triwulan II d. Pelaporan E-Monev e. Penyusunan laporan capaian kinerja triwulan II	a. Optimalisasi pengelolaan data kinerja sistem kinerja ekon-GO b. Menyiapkan bahan publikasi media Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital c. Pelaporan capaian kinerja individu (SKP) triwulan III d. Pelaporan E-Monev e. Penyusunan laporan capaian kinerja triwulan III	a. Optimalisasi pengelolaan data kinerja sistem kinerja ekon-GO b. Menyiapkan bahan publikasi media Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital c. Pelaporan capaian kinerja individu (SKP) triwulan IV d. Penyusunan laporan capaian kinerja triwulan IV e. Pelaporan E-Monev f. Penyusunan laporan kinerja tahunan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
		1.4. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy	100%	Terselesaikannya seluruh isu strategis yang diberikan Deputy kepada Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persiapan koordinasi isu strategis di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Pelaksanaan Koordinasi isu strategis di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Monitoring dan Evaluasi isu strategis di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Tindak lanjut monitoring dan evaluasi isu strategis di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital
		1.5. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	85%	Terwujudnya penyelenggaraan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	a. Sosialisasi pembangunan Zona Integritas b. Melakukan perencanaan pelaksanaan SPIP	a. Melakukan penilaian dan analisis terkait penyelenggaraan SPIP dan menyusun laporan hasil penilaian mandiri SPIP b. Pembentukan Tim Zona Integritas c. Penandatanganan Pakta Integritas d. Penguatan dukungan	a. Penyusunan Survei Penilaian Integritas (SPI) b. Pelaksanaan Monev internal Zona Integritas c. Simulasi penilaian WBK/WBBM d. Peningkatan kapasitas SDM mengenai Zona Integritas	a. Evaluasi pelaksanaan SPIP b. Review kelengkapan eviden c. Tindak lanjut perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil simulasi

						pimpinan dan pegawai terhadap Zona Integritas		
		1.6. Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4	Terselenggaranya seluruh layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Optimal	Penyusunan kuesioner pengukuran survei kepuasan layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I	Pelaksanaan survei kepuasan layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I	a. Tindak lanjut hasil survei kepuasan layanan Semester I b. Persiapan survei kepuasan layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II	Pelaksanaan survei kepuasan layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II

Jakarta, Januari 2025

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital,



Pujo Setio



Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

MANUAL IKU

TA . 2025

Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital

ESELON II

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : 1.1

Sasaran Program	:	SS.1. Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan						
Deskripsi Sasaran Program		<p>Kinerja ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal seperti kinerja sektor perdagangan dalam negeri dan eksternal seperti kondisi perekonomian global. Produk Domestik Bruto (PDB) dibentuk oleh empat komponen utama, yaitu: (i) konsumsi rumah tangga, (ii) investasi; (iii) pengeluaran pemerintah; (iv) dan ekspor bersih.</p> <p>Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri. Sasaran strategis ini dapat memberikan gambaran kinerja sektor perdagangan dalam negeri yang juga pada gilirannya dapat memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam mengambil upaya-upaya perbaikan di sektor perdagangan dalam negeri</p> <p>Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pendekatan pengeluaran, kondisi eksternal dapat mempengaruhi semua faktor pembentuk PDB yakni konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Namun demikian, faktor yang paling dominan terpengaruh oleh kondisi eksternal adalah kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, penguatan nilai perdagangan internasional diperlukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan merupakan sasaran strategis dari prespektif <i>stakeholder</i> berupa alternatif kebijakan terbaik berdasarkan hasil rangkaian kegiatan perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu-isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan yang didukung dengan basis data yang akurat, lengkap dan relevan.</p>						
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB						
Deskripsi IKU	:	<table><tr><td>Definisi</td></tr><tr><td>Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB menjadi indikator penting dalam mencerminkan kemajuan transformasi ekonomi berbasis teknologi di Indonesia. Ekonomi digital meliputi berbagai aktivitas yang didorong oleh teknologi digital, seperti e-commerce, layanan keuangan digital (fintech), aplikasi digital, serta digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti manufaktur. Peningkatan kontribusi ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi yang mendukung, percepatan literasi digital masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pelaku usaha digital. Untuk memastikan capaian yang optimal, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara lintas kementerian/lembaga. Target ini selaras dengan RPJMN dan Visi Indonesia Digital 2045, serta menjadi ukuran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan potensi ekonomi digital.</td></tr><tr><td>Formula</td></tr><tr><td>Kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) $= \frac{\text{Nilai Tambah Ekonomi Digital}}{\text{Nilai Produk Domestik Bruto}} \times 100\%$</td></tr><tr><td>Tujuan</td></tr><tr><td>Mengetahui seberapa besar kontribusi ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.</td></tr></table>	Definisi	Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB menjadi indikator penting dalam mencerminkan kemajuan transformasi ekonomi berbasis teknologi di Indonesia. Ekonomi digital meliputi berbagai aktivitas yang didorong oleh teknologi digital, seperti e-commerce, layanan keuangan digital (fintech), aplikasi digital, serta digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti manufaktur. Peningkatan kontribusi ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi yang mendukung, percepatan literasi digital masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pelaku usaha digital. Untuk memastikan capaian yang optimal, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara lintas kementerian/lembaga. Target ini selaras dengan RPJMN dan Visi Indonesia Digital 2045, serta menjadi ukuran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan potensi ekonomi digital.	Formula	Kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) $= \frac{\text{Nilai Tambah Ekonomi Digital}}{\text{Nilai Produk Domestik Bruto}} \times 100\%$	Tujuan	Mengetahui seberapa besar kontribusi ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Definisi								
Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB menjadi indikator penting dalam mencerminkan kemajuan transformasi ekonomi berbasis teknologi di Indonesia. Ekonomi digital meliputi berbagai aktivitas yang didorong oleh teknologi digital, seperti e-commerce, layanan keuangan digital (fintech), aplikasi digital, serta digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti manufaktur. Peningkatan kontribusi ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi yang mendukung, percepatan literasi digital masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pelaku usaha digital. Untuk memastikan capaian yang optimal, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara lintas kementerian/lembaga. Target ini selaras dengan RPJMN dan Visi Indonesia Digital 2045, serta menjadi ukuran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan potensi ekonomi digital.								
Formula								
Kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) $= \frac{\text{Nilai Tambah Ekonomi Digital}}{\text{Nilai Produk Domestik Bruto}} \times 100\%$								
Tujuan								
Mengetahui seberapa besar kontribusi ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.								
Satuan Pengukuran		Persentase (%)						
Unit/Pihak Penyedia Data		Google Temasek dan/atau Badan Pusat Statistik						
Pejabat Penanggung Jawab Data		Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital						
Sumber Data	:	Google Temasek dan/atau Badan Pusat Statistik						
Tingkat Kendali IKU		(.....) High (....) Moderate (X) Low						
Tingkat Validitas IKU		(...) Exact (X) Proxy (.....) Activity						
Jenis Konsolidasi Periode		(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value						
Jenis Cascading IKU		(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading						
Metode Cascading		(....) Direct (X) Indirect						

Polarisasi IKU

:

(X) Maximize

(.....) Minimize

(.....) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(....) Bulanan

(....) Triwulanan

(....) Semesteran

(X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	8-9%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : 1.2

Sasaran Program

SS.1. Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan

Deskripsi Sasaran Program

Kinerja ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal seperti kinerja sektor perdagangan dalam negeri dan eksternal seperti kondisi perekonomian global. Produk Domestik Bruto (PDB) dibentuk oleh empat komponen utama, yaitu: (i) konsumsi rumah tangga, (ii) investasi; (iii) pengeluaran pemerintah; (iv) dan ekspor bersih.

Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri. Sasaran strategis ini dapat memberikan gambaran kinerja sektor perdagangan dalam negeri yang juga pada gilirannya dapat memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam mengambil upaya-upaya perbaikan di sektor perdagangan dalam negeri

Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pendekatan pengeluaran, kondisi eksternal dapat mempengaruhi semua faktor pembentuk PDB yakni konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Namun demikian, faktor yang paling dominan terpengaruh oleh kondisi eksternal adalah kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, penguatan nilai perdagangan internasional diperlukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan merupakan sasaran strategis dari perspektif *stakeholder* berupa alternatif kebijakan terbaik berdasarkan hasil rangkaian kegiatan perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu-isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan yang didukung dengan basis data yang akurat, lengkap dan relevan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB

Deskripsi IKU

Definisi

Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB nasional merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian penguatan perdagangan nasional melalui proses sinkronisasi, koordinasi dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Dewan Pengarah memiliki tugas-tugas antara lain:

- Merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsive;
- Menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor;
- Menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat yang timbul dalam proses peningkatan ekspor; dan
- Mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.

Dan untuk mendukung pelaksanaan Keppres tersebut, telah disusun Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional.

Melalui Keppres dan Kepmenko Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, akan dilakukan perumusan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif, menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan, serta menyelesaikan permasalahan yang ada agar peningkatan nilai ekspor nasional pada tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Formula

Kontribusi nilai ekspor barang dan jasa nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

$$= \frac{\text{Nilai Ekspor Barang} \pm \text{Nilai Ekspor Jasa}}{\text{Nilai Produk Domestik Bruto}} \times 100\%$$

	<div>Tujuan</div> <div>Mengukur kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebagai indikator keberhasilan penguatan perdagangan Indonesia</div>
Satuan Pengukuran	<div>Persentase (%)</div>
Unit/Pihak Penyedia Data	<div>Badan Pusat Statistik, Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor, Kemenko Perekonomian</div>
Pejabat Penanggung Jawab Data	<div>Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor</div>
Sumber Data	: <div>Badan Pusat Statistik, Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor, Kemenko Perekonomian</div>
Tingkat Kendali IKU	<div>(.....) High (...) Moderate (x) Low</div>
Tingkat Validitas IKU	<div>(...) Exact (x) Proxy (.....) Activity</div>
Jenis Konsolidasi Periode	<div>(.....) Sum (.....) Average (x) Take Last Known Value</div>
Jenis Cascading IKU	<div>(x) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading</div>
Metode Cascading	<div>(x) Direct (....) Indirect</div>
Polarisasi IKU	: <div>(x) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize</div>
Periode Pelaporan	: <div>(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (x) Tahunan</div>

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	21,7%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : 1.3

Sasaran Program	: SS.1. Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan						
Deskripsi Sasaran Program	<p>Kinerja ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal seperti kinerja sektor perdagangan dalam negeri dan eksternal seperti kondisi perekonomian global. Produk Domestik Bruto (PDB) dibentuk oleh empat komponen utama, yaitu: (i) konsumsi rumah tangga, (ii) investasi; (iii) pengeluaran pemerintah; (iv) dan ekspor bersih.</p> <p>Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri. Sasaran strategis ini dapat memberikan gambaran kinerja sektor perdagangan dalam negeri yang juga pada gilirannya dapat memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam mengambil upaya-upaya perbaikan di sektor perdagangan dalam negeri</p> <p>Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pendekatan pengeluaran, kondisi eksternal dapat mempengaruhi semua faktor pembentuk PDB yakni konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Namun demikian, faktor yang paling dominan terpengaruh oleh kondisi eksternal adalah kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, penguatan nilai perdagangan internasional diperlukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan merupakan sasaran strategis dari prespektif <i>stakeholder</i> berupa alternatif kebijakan terbaik berdasarkan hasil rangkaian kegiatan perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu-isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan yang didukung dengan basis data yang akurat, lengkap dan relevan.</p>						
Indikator Kinerja Utama (IKU)	: IKU.1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB						
Deskripsi IKU	<table><tr><td>Definisi</td></tr><tr><td>Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB merupakan persentase dari nilai perdagangan besar dan eceran dibandingkan dengan PDB Nasional secara keseluruhan. Sektor perdagangan besar maupun eceran, merupakan urat nadi perekonomian daerah dan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang krusial. Kinerja sektor ini secara langsung mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah. Pada tahun 2024, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor secara nasional berkontribusi 13,07% terhadap PDB Nasional, hanya di bawah Industri Pengolahan berdasarkan distribusi PDB menurut Lapangan Usaha.</td></tr><tr><td>Formula</td></tr><tr><td>Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB = (Nilai perdagangan besar dan eceran/nilai PDB) * 100%</td></tr><tr><td>Tujuan</td></tr><tr><td>Mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.</td></tr></table>	Definisi	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB merupakan persentase dari nilai perdagangan besar dan eceran dibandingkan dengan PDB Nasional secara keseluruhan. Sektor perdagangan besar maupun eceran, merupakan urat nadi perekonomian daerah dan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang krusial. Kinerja sektor ini secara langsung mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah. Pada tahun 2024, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor secara nasional berkontribusi 13,07% terhadap PDB Nasional, hanya di bawah Industri Pengolahan berdasarkan distribusi PDB menurut Lapangan Usaha.	Formula	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB = (Nilai perdagangan besar dan eceran/nilai PDB) * 100%	Tujuan	Mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Definisi							
Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB merupakan persentase dari nilai perdagangan besar dan eceran dibandingkan dengan PDB Nasional secara keseluruhan. Sektor perdagangan besar maupun eceran, merupakan urat nadi perekonomian daerah dan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang krusial. Kinerja sektor ini secara langsung mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah. Pada tahun 2024, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor secara nasional berkontribusi 13,07% terhadap PDB Nasional, hanya di bawah Industri Pengolahan berdasarkan distribusi PDB menurut Lapangan Usaha.							
Formula							
Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB = (Nilai perdagangan besar dan eceran/nilai PDB) * 100%							
Tujuan							
Mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.							
Satuan Pengukuran	Persentase (%)						
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik						
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga						
Sumber Data	: Badan Pusat Statistik						
Tingkat Kendali IKU	(.....) High (x) Moderate (....) Low						
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact (x) Proxy (.....) Activity						
Jenis Konsolidasi Periode	(.....) Sum (.....) Average (x) Take Last Known Value						
Jenis Cascading IKU	(x) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading						

Metode Cascading

(....) Direct

(x) Indirect

Polarisasi IKU

:

(....) Maximize

(.....) Minimize

(x) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(....) Bulanan

(....) Triwulanan

(....) Semesteran

(x) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	13,07%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: S.2.1

Sasaran Program	: SS.2 Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Program	Sistem logistik nasional yang berkualitas adalah sistem yang menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan logistik, baik domestik maupun internasional, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mencakup seluruh proses dari hulu hingga hilir guna meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan daya saing perekonomian nasional.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	: IKU.2.1 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB
Deskripsi IKU	<div> <div>Definisi</div> <p>Biaya transportasi adalah biaya yang mencakup biaya transportasi primer dan sekunder menggunakan seluruh moda (darat, laut, udara). Biaya transportasi primer meliputi biaya perpindahan pengisian dari pabrik atau pusat distribusi ke pabrik atau pusat distribusi lain, dan pengangkutan inbound atas perpindahan barang jadi yang dibeli ke pabrik atau pusat distribusi. Biaya transportasi sekunder termasuk pembayaran kepada pengangkut, tunjangan penjemputan, peralatan truk atau kereta api dan biaya operasional.</p> <p>Biaya transportasi terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Biaya Jasa Angkutan Darat Selain Angkutan Rel Biaya Jasa Penunjang Angkutan Biaya Jasa Angkutan Laut Biaya Jasa Angkutan Udara Biaya Jasa Pos dan Kurir Biaya Jasa Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Jasa Angkutan Rel <div>Formula</div> <p>Biaya Transportasi Logistik Terhadap PDB = (Nilai biaya transportasi logistik/nilai PDB) * 100%</p> <div>Tujuan</div> <p>Memberikan gambaran kenaikan atau penurunan biaya transportasi logistik.</p> </div>
Satuan Pengukuran	Persentase(%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional
Sumber Data	: Laporan PDB Lapangan Usaha Triwulanan dan Tahunan dan/atau Laporan Tahunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
Tingkat Kendali IKU	(...) High (x) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact (x) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (x) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(x) Cascading Peta (...) Cascading NonPeta (...) NonCascading
Metode Cascading	(...) Direct (x) Indirect
Polarisasi IKU	: (...) Maximize (x) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(...) Bulanan

(...) Triwulanan

(...) Semesteran

(x) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	N/A	8,79%*	8,27%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	-

*Realisasi di tahun 2022 sebagai *baseline* tahun 2024 (sumber: RPJMN 2025-2029)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : 2.2

Sasaran Program	:	SS.2. Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Program		Sistem logistik nasional yang berkualitas adalah sistem yang menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan logistik, baik domestik maupun internasional, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mencakup seluruh proses dari hulu hingga hilir guna meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan daya saing perekonomian nasional.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.2.2. Rata-Rata Waktu Perputaran di Pelabuhan
Deskripsi IKU	:	<p>Definisi</p> <p>Waktu perputaran (turnaround time) di pelabuhan Tanjung Priok untuk kegiatan ekspor-impor adalah waktu yang dibutuhkan sebuah kapal untuk melakukan satu siklus lengkap di pelabuhan Tanjung Priok, mulai dari bersandar, bongkar muat, hingga akhirnya berlayar kembali. Waktu perputaran yang efisien sangat penting bagi efisiensi rantai pasokan dan kinerja pelabuhan secara keseluruhan. Waktu perputaran yang lama dapat menyebabkan penumpukan kapal di pelabuhan, keterlambatan pengiriman barang, dan peningkatan biaya logistik.</p> <p>Formula</p> <p>Waktu Perputaran di Pelabuhan (TT) = (Jumlah Waktu Keberangkatan Aktual – Waktu Tiba Aktual) : Jumlah Kapal</p> <p>Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok = $\frac{\text{Rata-rata TT Seluruh Bulan}}{12}$</p> <p>Tujuan</p> <p>Memberikan gambaran kinerja pelabuhan dalam memperlancar kegiatan arus lalu lintas transportasi angkutan laut sebagai penunjang kegiatan ekspor dan impor secara umum.</p>
Satuan Pengukuran		Hari
Unit/Pihak Penyedia Data		Kementerian Perhubungan dan Pengelola Pelabuhan Tanjung Priok
Pejabat Penanggung Jawab Data		Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional
Sumber Data	:	Laporan Bulanan dan/atau Triwulanan Kementerian Perhubungan dan Pengelola Pelabuhan
Tingkat Kendali IKU		(.....) High (x) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU		(...) Exact (x) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode		(.....) Sum (x) Average (....) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU		(x) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading		(....) Direct (x) Indirect
Polarisasi IKU	:	(x) Maximize (....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(....) Bulanan (x) Triwulanan (....) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	1,8 (hari)*	1,7 (hari)
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	1,7 (hari)
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	1,7 (hari)
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	1,7 (hari)
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	1,7 (hari)

*Realisasi di tahun 2024 sebagai *baseline* (sumber: RPJMN 2025-2029)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : 3.1

Sasaran Program	:	SS.3. Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan
Deskripsi Sasaran Program		Inklusi keuangan adalah penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan, seperti jumlah rekening tabungan dan kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal, sedangkan literasi keuangan adalah Pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai Kesejahteraan keuangan masyarakat.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.3.1. Indeks Literasi Keuangan
Deskripsi IKU	:	<p>Definisi</p> <p>Penggunaan akun/ layanan keuangan formal adalah penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan, seperti jumlah rekening tabungan dan kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal, jumlah rekening uang elektronik terdaftar (registered) pada penerbit uang elektronik, persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal. Literasi keuangan diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu (i) pengetahuan, (ii) pengetahuan, (iii) keyakinan, (iv) sikap, dan (v) perilaku.</p> <p>Formula</p> <p>Untuk mengukur indeks literasi keuangan konvensional dilakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).</p> <p>Tujuan</p> <p>Literasi keuangan yang memadai mendorong meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu, serta perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.</p>
Satuan Pengukuran		Indeks
Unit/Pihak Penyedia Data		Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan
Pejabat Penanggung Jawab Data		Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan
Sumber Data	:	SNLIK OJK
Tingkat Kendali IKU		(.....) High (...) Moderate (x) Low
Tingkat Validitas IKU		(x) Exact (...) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode		(.....) Sum (...) Average (x) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU		(x) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading		(.....) Direct (x) Indirect
Polarisasi IKU	:	(x) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (x) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	57,25
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : 4.1

Sasaran Program	: SS.4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Bidang PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital yang Berkualitas		
Deskripsi Sasaran Program	<p>Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 mengamanatkan Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga di bidang perniagaan dan ekonomi digital. Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi: a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital; b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital; c) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital; d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan ekonomi digital; e) pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital; dan f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.</p>		
Indikator Kinerja Utama (IKU)	: IKU.4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital		
Deskripsi IKU	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td><p>Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital.</p><p>Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital adalah:</p><div><div>(1) Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan</div><div>(2) Pengembangan Ekspor Nasional</div><div>(3) Penguatan Ekosistem Logistik Nasional</div><div>(4) Pengembangan Ekonomi Digital</div><div>(5) Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan</div></div><p>Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator <i>internal bussiness</i> yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital.</p><p>Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (<i>agenda setting</i>)</p><p>Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan <i>stakeholder</i> terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan <i>stakeholder</i> terkait selanjutnya menjadi <i>input</i> dalam tahapan selanjutnya.</p><p>Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh</p></td></tr></table>	Definisi	<p>Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital.</p> <p>Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital adalah:</p> <div><div>(1) Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan</div><div>(2) Pengembangan Ekspor Nasional</div><div>(3) Penguatan Ekosistem Logistik Nasional</div><div>(4) Pengembangan Ekonomi Digital</div><div>(5) Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan</div></div> <p>Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator <i>internal bussiness</i> yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital.</p> <p>Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (<i>agenda setting</i>)</p> <p>Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan <i>stakeholder</i> terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan <i>stakeholder</i> terkait selanjutnya menjadi <i>input</i> dalam tahapan selanjutnya.</p> <p>Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh</p>
Definisi			
<p>Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital.</p> <p>Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital adalah:</p> <div><div>(1) Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan</div><div>(2) Pengembangan Ekspor Nasional</div><div>(3) Penguatan Ekosistem Logistik Nasional</div><div>(4) Pengembangan Ekonomi Digital</div><div>(5) Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan</div></div> <p>Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator <i>internal bussiness</i> yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital.</p> <p>Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (<i>agenda setting</i>)</p> <p>Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan <i>stakeholder</i> terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan <i>stakeholder</i> terkait selanjutnya menjadi <i>input</i> dalam tahapan selanjutnya.</p> <p>Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh</p>			

seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Formula

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektifitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputy dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks efektifitas SKP} = \sqrt[5]{SKP\ AD\ 1 \times SKP\ AD\ 2 \times SKP\ AD\ 3 \times SKP\ AD\ 4 \times SKP\ AD\ 5}$$

Nilai Akhir Indeks efektifitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100

Efektif (3), rentang nilai 81 - 90

Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80

Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

Tujuan

Untuk mengetahui efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian yang dilakukan serta memberikan gambaran sektor yang harus dijadikan fokus guna pencapaian target Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global dan Biaya Logistik.

Satuan Pengukuran

Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data

Seluruh Eselon II Kedeputan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pejabat Penanggung Jawab Data

Seluruh Asisten Deputy Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sumber Data

: Seluruh Asisten Deputy Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tingkat Kendali IKU

(X) High (....) Moderate (....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (....) Proxy (....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading

Metode Cascading

(....) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

: (X) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize

Periode Pelaporan

: (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4 (Baik)
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4 (Baik)
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4 (Baik)
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4 (Baik)
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4 (Baik)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : 5.1

Sasaran Program	:	SS.5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perneragaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Program		Sasaran program ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi yang mencakup: a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perneragaan dan ekonomi digital; b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perneragaan dan ekonomi digital; c) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perneragaan dan ekonomi digital; d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perneragaan dan ekonomi digital; e) pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital; dan f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perneragaan dan Ekonomi Digital
Deskripsi IKU	:	<p>Definisi</p> <p>Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perneragaan dan Ekonomi Digital merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Perneragaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/<i>Stakeholder</i> terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.</p> <p>Formula</p> <p>Mengukur indikator tingkat kepuasan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perneragaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/<i>Stakeholder</i> terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas; (2) Tidak Puas; (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{(\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 4} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5})}{5}$ <p>Tujuan</p> <p>Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan Perneragaan dan Ekonomi Digital sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.</p>
Satuan Pengukuran		Indeks
Unit/Pihak Penyedia Data		Kedeputan Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital
Pejabat Penanggung Jawab Data		Deputi Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital
Sumber Data	:	Hasil Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perneragaan dan Ekonomi Digital
Tingkat Kendali IKU		(....) High (X) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU		(X) Exact (....) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode		(....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU		(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading
Metode Cascading		(....) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	:	(X) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(....) Bulanan

(X) Triwulanan

(....) Semesteran

(....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4 (Baik)
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4 (Baik)
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4 (Baik)
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4 (Baik)
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4 (Baik)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU : 6.1

Sasaran Program	: SS.6. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Perneragaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Program	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital yang baik merupakan sasaran kegiatan yang berfokus pada Perspektif <i>Learning and Growth</i> dan merupakan turunan dari sasaran kegiatan Perspektif <i>Learning and Growth</i> level kedeputan yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan yang Baik. Ketercapaian sasaran kegiatan ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	: IKU.6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perneragaan dan Ekonomi Digital
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital merupakan persentasi pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian.</p> <p>Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital ditargetkan sebanyak 12 rencana aksi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (ZI) (1 kegiatan pada triwulan IV) 2.Nilai SAKIP (2 kegiatan pada triwulan I, 1 kegiatan pada triwulan II, 1 kegiatan pada triwulan III, 2 kegiatan pada triwulan IV) 3.Tingkat Digitalisasi Arsip (1 kegiatan pada masing-masing triwulan I-IV) <p>Formula</p> <p>Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital:</p> $\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$ <p>Tujuan</p> <p>Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon I.</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Hukum dan Organisasi
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital
Sumber Data	: Rekapitulasi/ Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian
Tingkat Kendali IKU	(X) High (....) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact (X) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	: (X) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(....) Bulanan

(X) Triwulanan

(....) Semesteran

(....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	85%



Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

MANUAL IKU

TA . 2025

- Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga
- Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
- Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional
- Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital
- Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan
- Sekretariat Deputi

ESELON II

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN TERTIB NIAGA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: 1.1

Sasaran Kegiatan	SP.1 Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Dalam Negeri			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri. Sasaran strategis ini dapat memberikan gambaran kinerja sektor perdagangan dalam negeri yang juga pada gilirannya dapat memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam mengambil upaya-upaya perbaikan di sektor perdagangan dalam negeri.			
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.1 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera		
Deskripsi IKU	:	Definisi		
		Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera merupakan persentase dari nilai perdagangan besar dan eceran dibandingkan dengan PDRB Pulau Sumatera secara keseluruhan. Sektor perdagangan besar maupun eceran, merupakan urat nadi perekonomian daerah dan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang krusial. Kinerja sektor ini secara langsung mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah. Pada tahun 2024, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor secara nasional berkontribusi 13,07% terhadap PDB Nasional, hanya di bawah Industri Pengolahan berdasarkan distribusi PDB menurut Lapangan Usaha. Secara keseluruhan, Pulau Sumatera merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Kontribusi signifikan dari berbagai sektor di pulau ini, terutama yang berbasis pada sumber daya alam, pertanian, industri, dan perdagangan, menjadikan Sumatera sebagai kontributor penting dalam pembentukan PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2024, Pulau Sumatera secara spasial menjadi kontributor terbesar kedua terhadap struktur perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 22,12% terhadap PDB.		
		Formula		
		Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera = (Nilai perdagangan besar dan eceran Pulau Sumatera/nilai PDRB Pulau Sumatera) * 100%		
		Tujuan		
		Mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.		
Satuan Pengukuran		Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data		Badan Pusat Statistik,		
Pejabat Penanggung Jawab Data		Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga		
Sumber Data	:	Badan Pusat Statistik,		
Tingkat Kendali IKU		(...) High	(x) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU		(...) Exact	(x) Proxy	(...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode	<input type="checkbox"/> (...) Sum <input type="checkbox"/> (...) Average <input checked="" type="checkbox"/> (x) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	<input checked="" type="checkbox"/> (x) Cascading Peta <input type="checkbox"/> (...) Cascading NonPeta <input type="checkbox"/> (...) NonCascading
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> (...) Direct <input checked="" type="checkbox"/> (x) Indirect
Polarisasi IKU	: <input checked="" type="checkbox"/> (X) Maximize <input type="checkbox"/> (...) Minimize <input type="checkbox"/> (...) Stabilize
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> (...) Bulanan <input type="checkbox"/> (...) Triwulanan <input type="checkbox"/> (...) Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> (x) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	N/A	11,63%*	12,10%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Realisasi di tahun 2022 sebagai baseline tahun 2024 (sumber: RPJMN 2025-2029)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN TERTIB NIAGA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: S.1.2

Perspektif

(x) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis

SS.1 Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Dalam Negeri

Deskripsi Sasaran Strategis

Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri. Sasaran strategis ini dapat memberikan gambaran kinerja sektor perdagangan dalam negeri yang juga pada gilirannya dapat memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam mengambil upaya-upaya perbaikan di sektor perdagangan dalam negeri.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.1.1 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa

Deskripsi IKU

Definisi
Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa merupakan persentase dari nilai perdagangan besar dan eceran dibandingkan dengan PDRB Pulau Jawa secara keseluruhan. Sektor perdagangan besar maupun eceran, merupakan urat nadi perekonomian daerah dan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang krusial. Kinerja sektor ini secara langsung mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah. Pada tahun 2024, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor secara nasional berkontribusi 13,07% terhadap PDB Nasional, hanya di bawah Industri Pengolahan berdasarkan distribusi PDB menurut Lapangan Usaha.
Secara keseluruhan, Pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja perekonomian Indonesia secara spasial. Kontribusi signifikan dari berbagai sektor di pulau ini, terutama yang berbasis pada pertanian, industri, dan perdagangan, menjadikan Jawa sebagai kontributor utama dalam pembentukan PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2024, Pulau Jawa menjadi kontributor terbesar terhadap struktur perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 57,02% terhadap PDB.

Formula
$$\text{Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa} = \frac{(\text{Nilai perdagangan besar dan eceran Pulau Jawa})}{(\text{nilai PDRB Pulau Jawa})} \times 100\%$$

Tujuan
Mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Badan Pusat Statistik,

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga

Sumber Data	Badan Pusat Statistik,
Tingkat Kendali IKU	(...) High (x) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact (x) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (x) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(x) Cascading Peta (...) Cascading NonPeta (...) NonCascading
Metode Cascading	(...) Direct (x) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (x) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	N/A	12,48%*	13,31%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PASAR DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN TERTIB NIAGA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: 2.1

Sasaran Kegiatan

SK.2 Terwujudnya Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden.

Sasaran strategis terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian selain menunjukkan bahwa unit organisasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya juga merupakan sasaran strategis yang memiliki pengaruh pada ketercapaian sasaran strategis "Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang berkualitas". Dengan kata lain, Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang efektif dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan berkualitas apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**.

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait isu pengembangan usaha ritel, dilaksanakan terkait isu-isu seperti:

1. Perpajakan;
2. Perizinan berusaha;
3. Pengembangan bisnis;
4. Isu-isu lain yang berkembang sepanjang tahun 2025.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan Rapat Koordinasi dan telaahan staf terkait Isu Pengembangan Usaha Ritel. Namun pelaksanaan tahapan ini disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah telaahan staf tentang alternatif terkait Isu Pengembangan Usaha Ritel. Namun pelaksanaan tahapan ini disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah notula dan/atau Surat Deputi terkait Isu Pengembangan Usaha Ritel. Namun pelaksanaan

tahapan ini disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025..

Meski demikian, pelaksanaan tahapan ini akan disesuaikan dengan perkembangan pada waktu terkait.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan monev terkait Isu Pengembangan Usaha Ritel. Namun pelaksanaan tahapan ini disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025..

Formula

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

Nilai Tahapan Pertama = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 20%

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

Nilai Tahapan Kedua = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 25%

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

Nilai Tahapan Ketiga = (Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan/Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan) * 27,5%

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

Nilai Tahapan Keempat = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 27,5%

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha Ritel

% efektivitas SKP = Nilai Tahapan Pertama + Nilai Tahapan Kedua + Nilai Tahapan ketiga + Nilai Tahapan keempat

	Tujuan Mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Sumber Data	Dokumen koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel
Tingkat Kendali IKU	(x) High (...) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(x) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(x) Sum (...) Average (...) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(x) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (x) Indirect
Polarisasi IKU	(x) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (x) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	80%	80%	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	80%	80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PASAR DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN TERTIB NIAGA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: 2.2

Sasaran Kegiatan

SK.2 Terwujudnya Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden.

Sasaran strategis terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian selain menunjukkan bahwa unit organisasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya juga merupakan sasaran strategis yang memiliki pengaruh pada ketercapaian sasaran strategis "Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang berkualitas". Dengan kata lain, Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang efektif dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Standardisasi dan Pengawasan Perdagangan. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan berkualitas apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan Rapat Koordinasi dan telaahan staf terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan. Namun pelaksanaan tahapan ini disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah telaahan staf tentang alternatif kebijakan Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan. Namun pelaksanaan tahapan ini disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah notula dan/atau Surat Deputi terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan. Namun pelaksanaan tahapan ini disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general

adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan movev terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan. Namun pelaksanaan tahapan ini disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025.

Formula

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

Nilai Tahapan Pertama = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 20

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

Nilai Tahapan Kedua = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 25

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

Nilai Tahapan Ketiga = (Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan/Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan) * 27,5

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

Nilai Tahapan Keempat = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 27,5

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan

% efektivitas SKP = Nilai Tahapan Pertama + Nilai Tahapan Kedua + Nilai Tahapan ketiga + Nilai Tahapan keempat

Tujuan

Mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Sumber Data	Dokumen koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan
Tingkat Kendali IKU	(x) High (...) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	(x) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(x) Sum (...) Average (...) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(x) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (x) Indirect
Polarisasi IKU	(x) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (x) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	80%	80%	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	80%	80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 3.1

Sasaran Kegiatan

SS.1 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang mencakup (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Deskripsi IKU

Definisi	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri dari 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.
Formula	<p>Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan} \times \text{Rerata Jawaban dari masing-masing item Survei/Jumlah Item Survei}}$
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Satuan Pengukuran

Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Sumber Data

Hasil Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (....) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non-Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan (...) Triwulanan (X) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
TERTIB NIAGA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: 4.1

Sasaran Kegiatan	SS.4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang Baik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang baik merupakan sasaran strategis yang berfokus pada Perspektif Learning and Growth dan merupakan turunan dari sasaran strategis Perspektif Learning and Growth level ke deputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital yang Baik. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang Baik.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Deskripsi IKU	<div>Definisi</div> <p>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Adapun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga tahun 2025 terdiri dari: (i) 4 kegiatan pada Triwulan I; (ii) 3 kegiatan pada Triwulan II; (iii) 5 kegiatan pada Triwulan III; (iv) 3 kegiatan pada Triwulan IV.</p> <div>Formula</div> <p>Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga:</p> $\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$ <div>Tujuan</div> <p>Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon II.</p>
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Hukum dan Organisasi
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Sumber Data	Rekapitulasi/ Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian
Tingkat Kendali IKU	<div>(X) High</div> <div>(....) Moderate</div> <div>(....) Low</div>
Tingkat Validitas IKU	<div>(....) Exact</div> <div>(X) Proxy</div> <div>(....) Activity</div>
Jenis Konsolidasi Periode	<div>(....) Sum</div> <div>(....) Average</div> <div>(X) Take Last Known Value</div>
Jenis Cascading IKU	<div>(X) Cascading Peta</div> <div>(....) Cascading Non Peta</div> <div>(....) Non-Cascading</div>
Metode Cascading	<div>(..) Direct</div> <div>(X) Indirect</div>
Polarisasi IKU	<div>(X) Maximize</div> <div>(.....) Minimize</div> <div>(.....) Stabilize</div>
Periode Pelaporan	<div>(....) Bulanan</div> <div>(X) Triwulanan</div> <div>(....) Semesteran</div> <div>(....) Tahunan</div>

Commented [1]: IKU tetang RB dan IBP tingkat krnfali high

Commented [2]: IKU tetang RB dan IBP tingkat krnfali high

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	85%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (1.1)

ASISTEN DEPUTI FASILITASI PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: 1.1

Sasaran Strategis

SS.1 Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional

Deskripsi Sasaran Strategis

Kinerja ekonomi Indonesia tidak dapat terlepas dari faktor eksternal seperti kondisi perekonomian global. Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pendekatan pengeluaran, kondisi eksternal dapat mempengaruhi semua faktor pembentuk PDB yakni konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Namun demikian, faktor yang paling dominan terpengaruh oleh kondisi eksternal adalah kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, penguatan nilai perdagangan internasional diperlukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional merupakan sasaran strategis dari perspektif *stakeholder* berupa alternatif kebijakan terbaik berdasarkan hasil rangkaian kegiatan perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu-isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan yang didukung dengan basis data yang akurat, lengkap dan relevan.

Sasaran kegiatan ini menunjukkan output Keasdepan Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor sebagai unit yang menyelenggarakan fungsi menyiapkan koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan kebijakan dan pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi perdagangan dan pengembangan ekspor. Sasaran kegiatan tersebut bertujuan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam menetapkan suatu kebijakan di bidang fasilitasi perdagangan dan peningkatan ekspor.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 1.1 Nilai Ekspor Barang Nasional.

Deskripsi IKU

Definisi

Nilai ekspor barang nasional merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian penguatan nilai perdagangan internasional melalui proses sinkronisasi, koordinasi dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional.

IKU menggambarkan nilai ekspor barang pada periode tertentu. Sesuai dengan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor barang dihitung menurut harga Free on Board (FoB). Peningkatan ekspor barang di tahun 2025 sampai 2029 mendatang akan didukung oleh ekspor produk berteknologi menengah tinggi, ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi, serta ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam seiring dengan keberlanjutan program hilirisasi dan industrialisasi.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Dewan Pengarah memiliki tugas-tugas antara lain:

- Merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsive;
- Menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor;
- Menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat yang timbul dalam proses peningkatan ekspor; dan
- Mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.

Dan untuk mendukung pelaksanaan Keppres tersebut, telah disusun Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional.

Melalui Keppres dan Kepmenko Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, akan dilakukan perumusan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif, menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan, serta menyelesaikan permasalahan yang ada agar peningkatan nilai ekspor nasional pada tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Formula

Nilai ekspor barang nasional menurut harga Free on Board (FoB)

Tujuan

Mengukur nilai ekspor barang nasional sebagai indikator keberhasilan penguatan nilai perdagangan internasional

Satuan Pengukuran	Nilai USD
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik, Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor, Kemenko Perekonomian
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor, Kemenko Perekonomian
Tingkat Kendali IKU	(....) High (....) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(....) Exact (X) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (....) Non Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (....) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	USD 276,89 miliar
s.d Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	
s.d Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	
s.d Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	
s.d Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	

Handwritten signature/initials

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (2.1)

ASISTEN DEPUTI FASILITASI PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: 2.1

Sasaran Strategis

SS.2 Terwujudnya Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya kebijakan bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang mencakup (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekspor (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pengendalian impor; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan dalam hal penyederhanaan prosedur perdagangan dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden.

Sasaran strategis terwujudnya kebijakan fasilitas perdagangan dan pengembangan ekspor selain menunjukkan bahwa unit organisasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya, juga merupakan sasaran strategis yang memiliki pengaruh pada ketercapaian sasaran strategis "Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional". Dengan kata lain, Kebijakan di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang berkualitas dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor.

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase efektivitas dalam sinkronisasi, koordinasi maupun pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekspor.

Proses sinkronisasi, koordinasi maupun pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan, serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan) dengan pelaksanaan pengembangan ekspor.

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait isu pengembangan ekspor, seperti :

1. Kebijakan Peningkatan Ekspor untuk Komoditas sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Pertambangan dan Industri Manufaktur;
2. Perizinan berusaha di bidang ekspor;
3. Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA);
4. Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional (Satgas PEN);
5. Keikutsertaan Indonesia pada World Expo 2025 Osaka; dan
6. Isu - isu lain yang berkembang sepanjang tahun 2025.

Adapun nilai dari persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan bidang pengembangan ekspor diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan pertama, Keasdepan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor akan mengidentifikasi penyebab isu maupun permasalahan yang ada terkait dengan pengembangan ekspor. Walaupun neraca perdagangan Indonesia mencatatkan tren surplus selama 5 tahun terakhir sejak 2020 dengan nilai sebesar USD 31,04 miliar pada 2024, namun dalam situasi global yang tidak menentu perlu diwaspadai dan diantisipasi agar tidak terjadi penurunan permintaan ekspor sehingga neraca perdagangan masih tumbuh positif.

Identifikasi yang akan dilakukan antara lain dalam hal pengembangan sumber daya dan industri ekspor; strategi kerja sama diplomasi, promosi, dan pengembangan pasar ekspor; pembiayaan ekspor dan layanan asuransi ekspor; pelaksanaan simplikasi, sinkronisasi, dan integrasi proses bisnis dan layanan ekspor; dan strategi peningkatan ekspor usaha mikro kecil dan menengah.

Keluaran yang dihasilkan dalam tahapan pertama antara lain kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan dan alternatif solusinya.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahap pertama adalah dokumen telaahan staf terkait strategi kebijakan pengembangan ekspor nasional, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan kedua, Keasdepan Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor akan mulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program pengembangan ekspor yang selanjutnya disampaikan kepada Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, maupun kepada stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

Keluaran yang dihasilkan pada tahapan kedua antara lain:

- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Konsep alternatif kebijakan dan program;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan kedua adalah notula rapat penyusunan atas pembahasan rancangan alternatif kebijakan yang akan diambil maupun konsep dokumen telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program strategi pengembangan ekspor nasional, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025.

Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ketiga, Asdep Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Keluaran yang dihasilkan pada tahapan ketiga antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian);
- Rumusan kelembagaan;
- Rumusan perencanaan program;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ketiga adalah rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan perencanaan program maupun rumusan kebijakan terkait pengaturan ekspor maupun strategi pengembangan ekspor nasional, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan terakhir, rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Asisten Deputy Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor akan mengawal peraturan yang telah disusun dengan pelaksanaan komunikasi/sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Dan untuk selanjutnya akan dilakukan kegiatan monitoring yang bersifat general yakni pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi Keasdepan Fasilitasi dan Pengembangan Ekspor akan memetakan rekomendasi perbaikan (jika ada) yang harus dilakukan mendatang.

Keluaran yang dihasilkan pada tahapan keempat antara lain:

- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan keempat adalah laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pengaturan ekspor sebagai strategi dalam pengembangan ekspor nasional, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025.

Formula

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Pengembangan Ekspor

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Sumber Data

: Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Tingkat Kendali IKU

(....) High (X) Moderate (....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (....) Proxy (....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(X) Sum (....) Average (....) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (....) Non Cascading

Metode Cascading

(....) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

: (X) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize

Periode Pelaporan

: (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	72,5%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (2.2)

ASISTEN DEPUTI FASILITASI PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: 2.2

Sasaran Strategis

SS.2 Terwujudnya Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya Kebijakan Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang mencakup (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekspor (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pengendalian impor; dan (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan dalam hal penyederhanaan prosedur perdagangan.

Sasaran strategis terwujudnya kebijakan fasilitas perdagangan dan pengembangan ekspor selain menunjukkan bahwa unit organisasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya, juga merupakan sasaran strategis yang memiliki pengaruh pada ketercapaian sasaran strategis "Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional". Dengan kata lain, Kebijakan di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang berkualitas dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengendalian Impor.

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase efektivitas dalam sinkronisasi, koordinasi maupun pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengendalian impor.

Proses sinkronisasi, koordinasi maupun pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait isu pengendalian impor, seperti :

1. Perizinan berusaha di bidang impor;
2. Kebijakan *trade remedies* (Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) / Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP));
3. *Indonesia Single Risk Management* (ISRM); dan
4. Isu - isu lain yang berkembang sepanjang tahun 2025.

Adapun nilai dari persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan bidang pengendalian impor diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan pertama, Keasdepan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor akan mengidentifikasi penyebab isu maupun permasalahan yang ada terkait dengan pengendalian impor.

Tantangan utama kebijakan Impor Indonesia yaitu upaya pengelolaan impor bahan baku dan/atau bahan penolong industri serta barang konsumsi. Dalam hal kebutuhan industri, pengelolaan impor diarahkan untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri yang diharapkan dapat mendorong ekspor, substitusi impor, dan meningkatkan daya saing industri di dalam negeri. Sementara itu, dalam hal konsumsi masyarakat, pengendalian impor dilakukan untuk memastikan kualitas produk yang diimpor serta mencegah masuknya barang berbahaya atau tidak aman. Dan dalam hal pendapatan, kebijakan pengendalian impor dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan negara melalui bea masuk.

Identifikasi tahap awal yang akan dilakukan adalah dalam hal jaminan kepastian pasokan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan industri sehingga terdapat kepastian dalam berusaha.

Keluaran yang dihasilkan dalam tahapan pertama antara lain kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan dan alternatif solusinya;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahap pertama adalah dokumen telaahan staf terkait strategi kebijakan pengendalian impor, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan kedua, Keasdepan Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor akan mulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program dalam pengendalian impor yang selanjutnya disampaikan kepada Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, maupun kepada stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputy dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

Keluaran yang dihasilkan pada tahapan kedua antara lain:

- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- Konsep alternatif kebijakan dan program
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan kedua adalah notula rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan yang akan diambil maupun konsep dokumen telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program strategi pengendalian impor, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ketiga, Asdep Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian impor yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Keluaran yang dihasilkan pada tahapan ketiga antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian;
- Rumusan kelembagaan;
- Rumusan perencanaan program;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ketiga adalah rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan perencanaan program maupun rumusan kebijakan terkait pengaturan impor sebagai upaya pengelolaan impor bahan baku dan/atau bahan penolong industri, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan terakhir, rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Asisten Deputy Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor akan mengawal peraturan yang telah disusun dengan pelaksanaan komunikasi/sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Dan untuk selanjutnya akan dilakukan kegiatan monitoring yang bersifat general yakni pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi Keasdepan Fasilitasi dan Pengembangan Ekspor akan memetakan rekomendasi perbaikan (jika ada) yang harus dilakukan mendatang.

- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan keempat adalah laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan dan pengaturan impor sebagai upaya pengelolaan impor bahan baku dan/atau bahan penolong industri, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025.

Formula

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengendalian Impor

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Tujuan

Mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan kebijakan di bidang perekonomian sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Sumber Data

: Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Tingkat Kendali IKU

(....) High (X) Moderate (....) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (....) Proxy (....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(X) Sum (....) Average (....) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (....) Non Cascading

Metode Cascading

(....) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

: (X) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize

Periode Pelaporan

: (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (....) Bulanan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	72,5%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	80%

ee

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (2.3)

ASISTEN DEPUTI FASILITASI PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: 2.3

Sasaran Strategis

SS.2 Terwujudnya Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya kebijakan bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang mencakup (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekspor (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pengendalian impor; dan (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan dalam hal penyederhanaan prosedur perdagangan.

Sasaran strategis terwujudnya kebijakan fasilitas perdagangan dan pengembangan ekspor selain menunjukkan bahwa unit organisasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya, juga merupakan sasaran strategis yang memiliki pengaruh pada ketercapaian sasaran strategis "Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional". Dengan kata lain, Kebijakan di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang berkualitas dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan.

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase efektivitas dalam sinkronisasi, koordinasi maupun pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu penyederhanaan prosedur perdagangan agar permasalahan dan hambatan dalam perdagangan dapat teratasi.

Proses sinkronisasi, koordinasi maupun pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait isu penyederhanaan prosedur perdagangan, seperti :

1. Dashboard ekspor impor;
2. Komite Nasional Fasilitas Perdagangan (KNFP);
3. Perjanjian Internasional (WTO DSB, IPEF, OECD, dll); dan
4. Isu - isu lain yang berkembang sepanjang tahun 2025.

Adapun nilai dari persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan bidang pengembangan ekspor diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan pertama, Keasdepan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor akan mengidentifikasi penyebab isu maupun permasalahan yang ada terkait dengan penyederhanaan prosedur perdagangan.

Penyederhanaan prosedur perdagangan dilakukan guna menyempurnakan fasilitas perdagangan internasional agar mempermudah proses bisnis pelaku usaha dalam kegiatan ekspor dan impor, melalui fasilitas pelayanan seperti: Mitra Utama Kepabeanan (MITA); *Authorized Economic Operator* (AEO); Rush Handling; *Vooruitslag*; Neraca Komoditas (NK); Tempat Penimbunan Berikat (TPB); Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Kawasan Berikat (KB); Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); dan penetapan Eksportir dan Importir bereputasi baik, sehingga isu-isu fasilitas perdagangan yang berkaitan dengan pelaksanaan *World Trade Organization* (WTO) - *Trade Facilitation Agreement* (TFA) dapat ditangani dengan baik.

Identifikasi tahap awal yang akan dilakukan adalah dalam hal penyempurnaan fasilitas perdagangan internasional sebagai jaminan kemudahan proses bisnis pelaku usaha dalam kegiatan ekspor dan impor.

Keluaran yang dihasilkan dalam tahapan pertama antara lain kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan dan alternatif solusinya;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahap pertama adalah dokumen telaahan staf terkait strategi kebijakan penyederhanaan prosedur perdagangan, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan kedua, Keasdepan Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor akan mulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, maupun kepada stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

Keluaran yang dihasilkan pada tahapan kedua antara lain:

- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- Konsep alternatif kebijakan dan program
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan kedua adalah notula rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan yang akan diambil maupun konsep dokumen telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program strategi penyederhanaan prosedur perdagangan, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ketiga, Asdep Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan terkait penyederhanaan prosedur perdagangan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Keluaran yang dihasilkan pada tahapan ketiga antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian;
- Rumusan kelembagaan;
- Rumusan perencanaan program;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ketiga rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan perencanaan program maupun rumusan kebijakan terkait penyederhanaan prosedur perdagangan, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan terakhir, rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor akan mengawal peraturan yang telah disusun dengan pelaksanaan komunikasi/sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Dan untuk selanjutnya akan dilakukan kegiatan monitoring yang bersifat general yakni pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi Keasdepan Fasilitasi dan Pengembangan Ekspor akan memetakan rekomendasi perbaikan (jika ada) yang harus dilakukan mendatang.

Keluaran yang dihasilkan pada tahapan keempat antara lain:

- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan keempat adalah laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan penyederhanaan prosedur perdagangan, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi pada tahun 2025.

Formula

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Tujuan

Mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan penyederhanaan prosedur perdagangan

Satuan Pengukuran : Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data : Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Pejabat Penanggung Jawab Data : Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Sumber Data : Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Tingkat Kendali IKU : (....) High (X) Moderate (....) Low

Tingkat Validitas IKU : (X) Exact (....) Proxy (....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode : (X) Sum (....) Average (....) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU : (X) Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (....) Non Cascading

Metode Cascading : (....) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU : (X) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize

Periode Pelaporan : (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (....) Bulanan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	72,5%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	80%

Handwritten signature and initials.

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI FASILITASI PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: 3.1

Sasaran Strategis

SS.3 Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputy Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputy Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *Customer* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*.

Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekspor, pengendalian impor maupun penyederhanaan prosedur perdagangan; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pengembangan ekspor, pengendalian impor maupun penyederhanaan prosedur perdagangan; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan ekspor, pengendalian impor maupun penyederhanaan prosedur perdagangan; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden.

Sasaran strategis terwujudnya penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian selain menunjukkan bahwa unit organisasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya juga merupakan sasaran strategis yang memiliki pengaruh pada ketercapaian sasaran strategis "Terwujudnya Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas". Dengan kata lain, penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian yang terwujud secara efektif dan berkualitas menandakan bahwa fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mensinkronisasikan, mengoordinasikan dan mengendalikan kebijakan dapat berjalan secara harmonis bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, sehingga produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Deskripsi IKU

Definisi

Indeks Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputy Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 4 Aspek yakni (1) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan; (2) pengendalian pelaksanaan kebijakan; (3) pengelolaan dan penanganan isu; (4) penyelesaian isu yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga; dan (5) pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh dua indikator yakni Indikator Proses dan Indikator Hasil. Survey ini terdiri 21 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Formula

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian

Tujuan

Mengukur tingkat kepuasan dalam proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan fasilitas perdagangan dan pengembangan ekspor sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Satuan Pengukuran

Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
Sumber Data	Hasil Survey Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
Tingkat Kendali IKU	(....) High (X) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (....) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (....) Cascading Non-Peta (....) Non-Cascading
Metode Cascading	(....) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan (....) Triwulanan (X) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan II	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	3 dari 4
s.d. Triwulan IV	-	-	-	-	3 dari 4

Handwritten signature/initials

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI FASILITASI PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: 4.1

Sasaran Strategis

SS.4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas merupakan sasaran strategis yang berfokus pada *Perspektif Learning and Growth* dan merupakan turunan dari sasaran strategis *Perspektif Learning and Growth* level kedeputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital yang Berkualitas. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Baik.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Deskripsi IKU

Definisi
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Formula
Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor:
$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$
Tujuan
Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon II

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Biro Hukum dan Organisasi

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Sumber Data

Rekapitulasi/ Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian

Tingkat Kendali IKU

(X) High (....) Moderate (....) Low

Tingkat Validitas IKU

(....) Exact (X) Proxy (....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading

Metode Cascading

(....) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize

(.....) Minimize

(....) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan

(X) Triwulanan

(....) Semesteran

(....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	85%

Handwritten signature and initials.

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

KODE IKU: 1.1

Sasaran Kegiatan

SK.1 Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Sistem logistik nasional yang berkualitas adalah sistem yang menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan logistik, baik domestik maupun internasional, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mencakup seluruh proses dari hulu hingga hilir guna meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan daya saing perekonomian nasional.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.1.1 Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB

Deskripsi IKU

Definisi

Biaya transportasi angkutan darat dan laut terhadap PDB merupakan persentase dari nilai atau biaya jasa angkutan darat dan laut dibandingkan dengan PDB. Biaya jasa angkutan darat dan laut merupakan komponen dari biaya transportasi yang berkontribusi lebih dari 60%. Biaya jasa angkutan darat meliputi jasa angkutan darat selain angkutan rel, jasa angkutan rel, dan jasa angkutan sungai danau dan penyeberangan.

Formula

- a. **Persentase Biaya Logistik Angkutan Darat selain Rel** = (Nilai biaya jasa angkutan darat selain rel/nilai PDB) * 100%
- b. **Persentase Biaya Logistik Angkutan Rel** = (Nilai biaya jasa angkutan rel/nilai PDB) * 100%
- c. **Persentase Biaya Logistik Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan** = (Nilai biaya jasa angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/nilai PDB) * 100%
- d. **Persentase Biaya Logistik Angkutan Laut** = (Nilai biaya jasa angkutan laut/nilai PDB) * 100%

Persentase Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB = Persentase huruf a + Persentase huruf b + Persentase huruf c + Persentase huruf d

Tujuan

Memberikan gambaran kontribusi terhadap kenaikan atau penurunan biaya transportasi logistik.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Badan Pusat Statistik, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Sumber Data

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Tingkat Kendali IKU

(...) High (x) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU

(...) Exact (x) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (x) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(x) Cascading Peta (...) Cascading NonPeta (...) NonCascading

Metode Cascading

(...) Direct (x) Indirect

Polarisasi IKU

<input type="checkbox"/> (...) Maximize	<input checked="" type="checkbox"/> (x) Minimize	<input type="checkbox"/> (...) Stabilize
---	--	--

Periode Pelaporan

<input type="checkbox"/> (...) Bulanan	<input type="checkbox"/> (...) Triwulanan	<input type="checkbox"/> (...) Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> (x) Tahunan
--	---	---	---

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	N/A	3,82%*	3,58%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	

*Realisasi di tahun 2022 sebagai *baseline* tahun 2024 (sumber: RPJMN 2025-2029)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

KODE IKU: 1.2

Sasaran Kegiatan

SK.1 Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Sistem logistik nasional yang berkualitas adalah sistem yang menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan logistik, baik domestik maupun internasional, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mencakup seluruh proses dari hulu hingga hilir guna meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan daya saing perekonomian nasional.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.1.2 Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor - Impor

Deskripsi IKU

Definisi

Waktu perputaran (turnaround time) di pelabuhan Tanjung Priok untuk kegiatan ekspor-impor adalah waktu yang dibutuhkan sebuah kapal untuk melakukan satu siklus lengkap di pelabuhan Tanjung Priok, mulai dari bersandar, bongkar muat, hingga akhirnya berlayar kembali. Waktu perputaran yang efisien sangat penting bagi efisiensi rantai pasokan dan kinerja pelabuhan secara keseluruhan. Waktu perputaran yang lama dapat menyebabkan penumpukan kapal di pelabuhan, keterlambatan pengiriman barang, dan peningkatan biaya logistik.

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk yang menjadi barometer perekonomian Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priok juga merupakan salah satu pintu utama proses ekspor-impor yang berkontribusi lebih dari 70% kegiatan ekspor-impor Indonesia bersama dengan Pelabuhan Tanjung Perak.

Waktu perputaran (turnaround time) di pelabuhan Tanjung Priok difokuskan untuk kegiatan ekspor-impor yang menggunakan peti kemas.

Formula

Waktu Perputaran di Pelabuhan (TT) = (Jumlah Waktu Keberangkatan Aktual – Waktu Tiba Aktual) : Jumlah Kapal

$$\text{Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok} = \frac{\sum \text{Rerata TT Seluruh Bulan}}{12}$$

Tujuan

Memberikan gambaran kinerja pelabuhan Tanjung Priok dalam memperlancar kegiatan arus lalu lintas transportasi angkutan laut sebagai penunjang kegiatan ekspor dan impor secara umum .

Satuan Pengukuran

Hari

Unit/Pihak Penyedia Data

Kementerian Perhubungan dan Pengelola Pelabuhan Tanjung Priok

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Sumber Data

Kementerian Perhubungan dan Pengelola Pelabuhan Tanjung Priok

Tingkat Kendali IKU

(...) High (x) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU

(...) Exact (x) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (x) Average (...) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(x) Cascading Peta (...) Cascading NonPeta (...) NonCascading

Metode Cascading

(...) Direct (x) Indirect

Polarisasi IKU

(...) Maximize (...) Minimize (x) Stabilize

Periode Pelaporan

(...) Bulanan (x) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	1,3 – 1,8 (hari)
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	1,3 – 1,8 (hari)
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	1,3 – 1,8 (hari)
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	1,3 – 1,8 (hari)
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	1,3 – 1,8 (hari)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

KODE IKU: 1.3

Sasaran Kegiatan

SK.1 Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis

Sistem logistik nasional yang berkualitas adalah sistem yang menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan logistik, baik domestik maupun internasional, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mencakup seluruh proses dari hulu hingga hilir guna meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan daya saing perekonomian nasional.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.1.3 Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor - Impor

Deskripsi IKU

Definisi

Waktu perputaran (turnaround time) di pelabuhan Tanjung Perak untuk kegiatan ekspor-impor adalah waktu yang dibutuhkan sebuah kapal untuk melakukan satu siklus lengkap di pelabuhan Tanjung Perak, mulai dari bersandar, bongkar muat, hingga akhirnya berlayar kembali. Waktu perputaran yang efisien sangat penting bagi efisiensi rantai pasokan dan kinerja pelabuhan secara keseluruhan. Waktu perputaran yang lama dapat menyebabkan penumpukan kapal di pelabuhan, keterlambatan pengiriman barang, dan peningkatan biaya logistik.

Pelabuhan Tanjung Perak merupakan salah satu pelabuhan terbesar dan tersibuk kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi barometer perekonomian Indonesia. Pelabuhan Tanjung Perak juga merupakan salah satu pintu utama proses ekspor-impor yang berkontribusi lebih dari 70% kegiatan ekspor-impor Indonesia bersama dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

Waktu perputaran (turnaround time) di pelabuhan Tanjung Perak difokuskan untuk kegiatan ekspor-impor yang menggunakan peti kemas.

Formula

Waktu Perputaran di Pelabuhan (TT) = (Jumlah Waktu Keberangkatan Aktual – Waktu Tiba Aktual) : Jumlah Kapal

Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak = $\frac{\sum \text{Rerata TT Seluruh Bulan}}{12}$

Tujuan

Memberikan gambaran terhadap kinerja pelabuhan Tanjung Perak dalam memperlancar kegiatan arus lalu lintas transportasi angkutan laut sebagai penunjang kegiatan ekspor dan impor secara umum.

Satuan Pengukuran

Hari

Unit/Pihak Penyedia Data

Kementerian Perhubungan dan Pengelola Pelabuhan Tanjung Perak

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Sumber Data

Kementerian Perhubungan dan Pengelola Pelabuhan Tanjung Perak

Tingkat Kendali IKU

(...) High (x) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU

(...) Exact (x) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (x) Average (...) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU	(x) Cascading Peta	(...) Cascading NonPeta	(...) NonCascading
Metode Cascading	(...) Direct	(x) Indirect	
Polarisasi IKU	(...) Maximize	(...) Minimize	(x) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(x) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	1,3 – 1,8 (hari)
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	1,3 – 1,8 (hari)
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	1,3 – 1,8 (hari)
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	1,3 – 1,8 (hari)
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	1,3 – 1,8 (hari)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

KODE IKU: 2.1

Sasaran Kegiatan

SK.2 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional yang berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya kebijakan pengembangan logistik nasional yang berkualitas merupakan sasaran kegiatan perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran kegiatan ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan logistik nasional; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Deputi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase efektivitas dalam sinkronisasi, koordinasi maupun pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut.

Proses sinkronisasi, koordinasi maupun pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan) dengan Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait isu Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut, seperti:

1. Akses jalan dari pusat produksi/distribusi menuju pelabuhan;
2. Kapasitas pelabuhan sebagai simpul utama konektivitas logistik;
3. Isu-isu lain yang berkembang sepanjang tahun 2025

Adapun nilai dari persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan bidang Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan terkait dengan Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah telaahan staf terkait dengan Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Pada tahap ini disusun rumusan alternatif rekomendasi yang berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan terkait dengan Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut. Pada tahapan ini telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Keluaran yang dihasilkan selesai pada tahapan ini, antara lain:

1. Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
2. Konsep alternatif kebijakan dan program;
3. Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan kedua telaahan staf terkait dengan alternatif rekomendasi kebijakan dan program terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini dilakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut.

Keluaran yang dihasilkan pada tahapan ketiga antara lain:

1. Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian);
2. Rumusan kelembagaan;
3. Rumusan perencanaan program;
4. Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah notula dan/atau Surat Deputi perihal penetapan rekomendasi kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi rekomendasi kebijakanyang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Melalui dan evaluasi akan ditindaklanjuti pemetaan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Keluaran yang dihasilkan pada tahapan keempat antara lain:

1. Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
2. Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
3. Kertas Kerja Kebijakan;
4. Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan monev dan/atau laporan analisis terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut.

Formula

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

Nilai Tahapan Pertama = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 20%

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

Nilai Tahapan Kedua = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 25%

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

Nilai Tahapan Ketiga = (Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan/Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan) * 27,5%

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

Nilai Tahapan Keempat = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 27,5%

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut

% efektivitas SKP = % Tahapan Pertama+% Tahapan Kedua+% Tahapan ketiga+% Tahapan keempat

Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional

Sumber Data

Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional

Tingkat Kendali IKU

(x) High (...) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU

(x) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (x) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(x) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (x) Indirect

Polarisasi IKU

(x) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(...) Bulanan (x) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	80%	80%	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	80%	80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

KODE IKU: 2.2

Sasaran Kegiatan

SK.2 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional yang berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya kebijakan pengembangan logistik nasional yang berkualitas merupakan sasaran kegiatan perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran kegiatan ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan logistik nasional; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Deputi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase efektivitas dalam sinkronisasi, koordinasi maupun pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Proses sinkronisasi, koordinasi maupun pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait isu Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak, seperti:

1. Layanan digitalisasi aktivitas bongkar muat peti kemas ekspor impor
2. Sarana pendukung kerja aktivitas bongkar muat peti kemas ekspor impor;
3. Isu-isu lain yang berkembang sepanjang tahun 2025

Adapun nilai dari persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah telaahan staf terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Pada tahap ini disusun rumusan alternatif rekomendasi yang berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan terkait dengan Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Pada tahapan ini telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Keluaran yang dihasilkan selesai pada tahapan ini, antara lain:

1. Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
2. Konsep alternatif kebijakan dan program;
3. Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan kedua telaahan staf terkait dengan alternatif rekomendasi kebijakan dan program terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini dilakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Keluaran yang dihasilkan pada tahapan ketiga antara lain:

1. Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian;
2. Rumusan kelembagaan;
3. Rumusan perencanaan program;
4. Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah notula dan/atau Surat Deputi penetapan rekomendasi kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Melalui dan evaluasi akan ditindaklanjuti pemetaan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Keluaran yang dihasilkan pada tahapan keempat antara lain:

1. Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
2. Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
3. Kertas Kerja Kebijakan;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan monev dan/atau laporan analisis terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Formula

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

Nilai Tahapan Pertama = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 20%

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

Nilai Tahapan Kedua = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 25%

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

Nilai Tahapan Ketiga = (Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan/Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan) * 27,5%

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

Nilai Tahapan Keempat = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 27,5%

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

% efektivitas SKP = % Tahapan Pertama+% Tahapan Kedua+% Tahapan ketiga+% Tahapan keempat

Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait kinerja bongkar muat peti kemas untuk kegiatan ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Sumber Data

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Tingkat Kendali IKU

(x) High (..) Moderate (..) Low

Tingkat Validitas IKU

(x) Exact (..) Proxy (..) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(..) Sum (..) Average (x) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(x) Cascading Peta (..) Cascading Non Peta (..) Non-Cascading

Metode Cascading

(..) Direct (x) Indirect

Polarisasi IKU

(x) Maximize (..) Minimize (..) Stabilize

Periode Pelaporan

(..) Bulanan (x) Triwulanan (..) Semesteran (..) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	80%	80%	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	80%	80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

KODE IKU: 3.1

Sasaran Kegiatan

SK.3 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan logistik nasional; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan logistik nasional; dan (3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Deputi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional

Deskripsi IKU

Definisi
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 4 Aspek yakni (1) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan; (2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan; (3) pengelolaan dan penanganan isu; (4) penyelesaian isu yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga; dan (5) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh dua indikator yakni Indikator Proses dan Indikator Hasil. Survey ini terdiri 21 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.
Formula
Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:
$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$
Tujuan
Mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan pengembangan logistik nasional sehingga menodorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Satuan Pengukuran

Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Sumber Data

Hasil Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (....) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non-Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
--	-----------------------------------	------------------------------------

Periode Pelaporan

<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
----------------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------------

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)	Baik (3 dari 4)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL

KODE IKU: 4.1

Sasaran Kegiatan

SK.4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional yang baik merupakan sasaran kegiatan yang berfokus pada Perspektif Learning and Growth dan merupakan turunan dari sasaran kegiatan Perspektif Learning and Growth level ke deputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Baik. Ketercapaian sasaran kegiatan ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional yang Baik.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Deskripsi IKU

Definisi
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun jumlah Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional, sebagai berikut:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Triwulan I sebanyak 5 rencana aksi 2. Triwulan II sebanyak 4 rencana aksi 3. Triwulan III sebanyak 6 rencana aksi 4. Triwulan IV sebanyak 4 rencana aksi
Formula
Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional:
$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$
Tujuan
Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon II.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Biro Hukum dan Organisasi

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Sumber Data

Rekapitulasi/Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian

Tingkat Kendali IKU

(X) High (....) Moderate (.....) Low

Tingkat Validitas IKU

(....) Exact (X) Proxy (.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading

Metode Cascading

(..) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	85%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital

KODE IKU: S.1

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Sasaran Kegiatan

SS.1. Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan merupakan sasaran strategis yang berfokus pada *Stakeholder* dalam melaksanakan beberapa kebijakan di Kementerian/Lembaga dengan issue pemantauan transaksi *E-Commerce*

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 1.1 Jumlah Volume Transaksi *E-commerce*

Deskripsi IKU

Definisi

Jumlah Volume Transaksi *E-commerce* adalah jumlah dari faktur transaksi ekonomi (penjualan atau pembelian) barang atau jasa, yang dilakukan melalui jaringan internet atau platform *e-commerce*. Target tahunannya diturunkan dari target nilai transaksi *e-commerce* sesuai RPJMN. Peningkatan jumlah volume transaksi *e-commerce* dapat diketahui bahwa berhasilnya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan penguatan ekonomi digital.

Hal ini meliputi adalah faktur transaksi penjualan atau pembelian barang atau jasa, baik antara bisnis, rumah tangga, individu, pemerintah, dan organisasi publik atau swasta lainnya, yang dilakukan melalui jaringan internet.

Pengukuran IKU ini dilakukan terhadap program atau kegiatan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pelaksanaan strategi pengembangan ekonomi digital nasional yang mendorong peningkatan Jumlah Volume Transaksi *E-commerce*.

Formula

Jumlah volume transaksi *e-commerce* diambil dari data Bank Indonesia (BI) yang diperbaharui setiap 3 bulan (triwulan).

Tujuan

Mendorong percepatan pelaksanaan strategi pengembangan ekonomi digital nasional untuk peningkatan jumlah volume transaksi *e-commerce* dalam rangka terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional.

Satuan Pengukuran

Faktur transaksi

Unit/Pihak Penyedia Data

Bank Indonesia

Pejabat Penanggung Jawab Data

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran

Sumber Data

Laporan jumlah volume transaksi *e-commerce* triwulanan dari Bank Indonesia

Tingkat Kendali IKU

(.....) High (.....) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (....) Proxy (.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading

Metode Cascading

() Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran () Tahunan

Commented [1]: apakah sifatnya hasil akhir jumlah transaksi e commerce diambil dari penambahan2 dari beberapa periode, atau mau dilihat saja posisi terakhir di waktu tertentu, jika iya hanya mau liat posisi terakhir maka pilih take last known

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	2,4 miliar faktur transaksi	N/A	2,4 miliar faktur transaksi
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	0,6 miliar faktur transaksi	752 juta faktur transaksi	0,6 miliar faktur transaksi
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	1,2 miliar faktur transaksi	752 juta faktur transaksi	1,2 miliar faktur transaksi
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	1,8 miliar faktur transaksi	1,49 miliar faktur transaksi	1,8 miliar faktur transaksi
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	2,4 miliar faktur transaksi	N/A	2,4 miliar faktur transaksi

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

KODE IKU: S.2

Sasaran Kegiatan	SS.1. Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan merupakan sasaran strategis yang berfokus pada <i>Stakeholder</i> dalam melaksanakan beberapa kebijakan di Kementerian/Lembaga dengan <i>issue</i> Penyelesaian <i>Digital Economy Framework Agreement</i> (DEFA).
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU 1.2. Persentase Penyelesaian <i>Legal Drafting Digital Economy Framework Agreement</i> (DEFA)
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Indonesia merupakan bagian dari komunitas internasional, pada hakikatnya melakukan kerjasama internasional bertujuan untuk mewujudkan politik luar negeri yang berorientasi kepada kepentingan nasional. Salah satu kepentingan nasional yang diamanatkan kepada Pemerintahan baru adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 8%. Terdapat beberapa sektor kunci yang diidentifikasi untuk mencapai pertumbuhan tersebut, antara lain: Manufaktur (hilirisasi), jasa, konstruksi/perumahan, Ekonomi Digital, Semikonduktor, dan Ekonomi Hijau (transisi Energi). Khusus untuk Ekonomi Digital, Indonesia sedang melakukan upaya untuk menunjang pengembangan ekosistem digital. Terdapat beberapa langkah yang bisa diupayakan untuk pengembangan ekosistem dimaksud salah satunya melalui kerja sama internasional secara regional yaitu <i>Digital Economy Framework Agreement</i> (DEFA). Melalui DEFA, maka diharapkan akan ada dukungan pengembangan ekosistem digital yang dilakukan secara kolaboratif bersama anggota ASEAN sehingga ekosistem di tingkat regional akan mempercepat pengembangan ekosistem digital di Indonesia.</p> <p>Formula</p> <p>%Penyelesaian DEFA = (Jumlah Paragraf yang Disepakati / Jumlah Paragraf Keseluruhan) x 100%</p> <p>Persentase ini diperoleh dari <i>report set</i> yang disampaikan oleh ASEAN Secretariat.</p> <p>Tujuan</p> <p>DEFA menyediakan rambu-rambu pengaturan di bidang ekonomi digital yang sejalan dengan standar serta praktik terbaik Internasional. Keikutsertaan Indonesia di DEFA akan mendukung akses Indonesia di OECD, mengingat sebagian besar pengaturan yang diatur dalam DEFA sejalan dengan konsep kebijakan yang ada di OECD. Oleh karena itu, penyelesaian perundingan di DEFA akan mendukung percepatan proses akses Indonesia di OECD.</p>
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	ASEAN Secretariat
Pejabat Penanggung Jawab Data	Chair of ASEAN Secretariat
Sumber Data	ASEAN DEFA Report Set
Tingkat Kendali IKU	(.....) High (...) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact (X) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading	() Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

☒ (X) Maximize

☐ (.....) Minimize

☐ (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

☐ (....) Bulanan

☒ (X) Triwulanan

☐ (....) Semesteran

☐ () Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI
DIGITAL

KODE IKU: IBP 2.1

Sasaran Kegiatan

SS4. Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran kegiatan perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran kegiatan ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital; dan (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi digital; (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan, yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta *Monitoring* dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).**

Rekomendasi yang telah dihasilkan, yaitu Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030, yang terbit pada tahun 2023 sehingga dalam pelaksanaan indikator Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi dilaksanakan dengan mengawal pelaksanaan Buku Putih tersebut.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*).

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah telaahan staf mengenai pengembangan ekonomi digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah telaahan staf tentang alternatif rekomendasi mengenai pengembangan ekonomi digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- Rumusan perencanaan program,
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rumusan kebijakan mengenai pengembangan ekonomi digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi.

Tahapan Keempat: *Monitoring* dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau *piloting*, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan *monitoring* yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah *monitoring*, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau *piloting*; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan *monitoring* dan evaluasi dan/atau surat Deputi mengenai pengembangan ekonomi digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi.

Formula

<p>1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama</p> $\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p>2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua</p> $\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p>3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga</p> $\begin{aligned} \text{Nilai Tahapan Ketiga} &= \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\% \end{aligned}$ <p>4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat</p> $\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>5. Nilai Akhir Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi</p> $\% \text{ Efektivitas SKP} = \% \text{ Nilai Tahapan Pertama} + \% \text{ Nilai Tahapan Kedua} + \% \text{ Nilai Tahapan ketiga} + \% \text{ Nilai Tahapan keempat}$ <p>Tujuan</p> <p>Mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan kebijakan di bidang perekonomian sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.</p>
--

Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital
Sumber Data	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital
Tingkat Kendali IKU	(X) High (...) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect

Commented [1]: IKU IBP, high

Polarisasi IKU

(X) Maximize (.....) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (..) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI
DIGITAL

KODE IKU: IBP 2.2

Perspektif

(...) <i>Stakeholder</i>	(...) <i>Customer</i>	(x) <i>Internal Business Process</i>	(...) <i>Learning & Growth</i>
--------------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Sasaran Strategis

SS4. Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran kegiatan perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran kegiatan ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi digital; dan (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi digital; (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan, yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta *Monitoring* dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi berupa kertas posisi Indonesia untuk DEFA yang dirumuskan bersama K/L terkait.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4

(empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Notula/Nota Dinas Rapat Koordinasi Pembahasan isu Chapter DEFA yang masih belum disepakati.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Notula/Nota Dinas Rapat Koordinasi Pembahasan Chapter DEFA terkait isu yang belum disepakati dan alternatifnya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,

- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rumusan matriks posisi K/L pada masing-masing chapter.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau *piloting*, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan *monitoring* yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah *monitoring*, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau *piloting*; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputy tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputy tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rumusan kertas posisi Indonesia dalam perundingan DEFA.

Formula

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA

% Efektivitas SKP = %Nilai Tahapan Pertama + %Nilai Tahapan Kedua + %Nilai Tahapan ketiga + %Nilai Tahapan keempat

Tujuan

Mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan kebijakan di bidang perekonomian sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital

Sumber Data

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital

Tingkat Kendali IKU

☒ High

☐ Moderate

☐ Low

Tingkat Validitas IKU

☒ Exact

☐ Proxy

☐ Activity

Jenis Konsolidasi Periode

☐ Sum

☐ Average

☒ Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

☒ Cascading Peta

☐ Cascading Non Peta

☐ Non-Cascading

Metode Cascading

☐ Direct

☒ Indirect

Polarisasi IKU

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

Periode Pelaporan

☐ Bulanan

☒ Triwulanan

☐ Semesteran

☐ Tahunan

Commented [2]: high

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: C.3.1

Sasaran Kegiatan

SS.6. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital yang mencakup (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pengembangan Ekonomi Digital (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang Pengembangan Ekonomi Digital; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Pengembangan Ekonomi Digital; dan (d) pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata Kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital

Deskripsi IKU

Definisi
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Fiskal dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri dari 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.
Formula
Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:
$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\Sigma \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$
Tujuan
Mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi digital sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Satuan Pengukuran

Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital

Sumber Data

Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (....) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non-Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(...) Bulanan (...) Triwulanan (X) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	3 dari 4	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	3 dari 4	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	3 dari 4	N/A	3 dari 4

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: LG.4.1

Sasaran Kegiatan

SS.6. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas merupakan sasaran strategis yang berfokus pada Perspektif *Learning and Growth* dan merupakan turunan dari sasaran strategis *Internal Business Process*. Perspektif *Learning and Growth* level ke deputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital yang Berkualitas. Ketercapaian sasaran ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital

Deskripsi IKU

Definisi
<p>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputy. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital ditargetkan sebanyak 15 rencana aksi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU (triwulan 1), Penyusunan Renja tahun 2026 (triwulan 1), Penyusunan Revisi Renja 2025 (triwulan 2), Penyusunan laporan kinerja triwulanan (triwulan 1 s.d. 4), Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI (triwulan 1 s.d. 4), Penyusunan dan penetapan tim kerja (triwulan 3), Penyusunan matriks manajemen risiko (triwulan 3), Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2025 (triwulan 3), dan Penyusunan <i>draft</i> Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 (triwulan 4).
Formula
<p>Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital:</p> $\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$
Tujuan
<p>Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital.</p>

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Biro Hukum dan Organisasi

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital

Sumber Data

Rekapitulasi/ Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian

Tingkat Kendali IKU

(X) High (...) Moderate (....) Low

Tingkat Validitas IKU

(....) Exact (X) Proxy (....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta

(.....) Cascading Non Peta

(.....) Non-Cascading

Metode Cascading

(..) Direct

(X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize

(.....) Minimize

(.....) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan

(X) Triwulanan

(....) Semesteran

(....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	85%	N/A	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	85%	N/A	85%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan

KODE IKU:
S.1.1

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Sasaran Kegiatan

SS.1 Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan Masyarakat.
Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.1.1 Tingkat Literasi Keuangan Konvensional

Deskripsi IKU

Definisi
Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Literasi keuangan diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu (i) pengetahuan, (ii) keterampilan, (iii) keyakinan, (iv) sikap, dan (v) perilaku.

Adapun untuk Tingkat Literasi Keuangan Konvensional tahun 2025 terdiri dari: (i) 3 kegiatan pada Triwulan I; (ii) 3 kegiatan pada Triwulan II; (iii) 3 kegiatan pada Triwulan IV; dan (iv) 3 kegiatan pada Triwulan IV.

Formula
Untuk mengukur tingkat literasi keuangan konvensional dilakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Tujuan
Literasi keuangan yang memadai akan memberikan konsumen kemampuan dalam memahami informasi yang mereka terima, dan menilai manfaat dan risiko yang melekat pada setiap produk dan layanan keuangan formal.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Badan Pusat Statistik dan OJK

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan

Sumber Data

SNLIK OJK

Tingkat Kendali IKU

(.....) High (.....) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (....) Proxy (.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize	(.....) Minimize	(.....) Stabilize
--------------	------------------	------------------------

Periode Pelaporan

(....) Bulanan	(.....) Triwulanan	(....) Semesteran	(X) Tahunan
----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	57%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (.....) Stabilize (.....) Minimize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan (...) Triwulanan (....) Semesterar (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	39%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: IBP 2.1

Sasaran Kegiatan

:

SS.2 Terwujudnya Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait Inklusi dan Literasi Keuangan yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden.

Sasaran strategis terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian selain menunjukkan bahwa unit organisasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya juga merupakan sasaran strategis yang memiliki pengaruh pada ketercapaian sasaran strategis "Terwujudnya Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan yang Berkualitas". Dengan kata lain, Kebijakan di Bidang Pengembangan Logistik Nasional yang efektif dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

:

IKU 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan

Deskripsi IKU

:

Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan, yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta *Monitoring* dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Peningkatan Inklusi keuangan diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**.

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan, antara lain:

1. Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal dan Digital,
2. Peningkatan Literasi Keuangan dan perlindungan konsumen,
3. Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil,
4. Penyusunan regulasi terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan,
5. Isu-isu lain yang berkembang sepanjang tahun 2025.

Adapun nilai dari persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan, antara lain diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*).

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir mengenai Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi sepanjang tahun 2025.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat, notula dan daftar hadir rapat mengenai peningkatan Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi sepanjang tahun 2025.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan,
- Rumusan perencanaan program,
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rumusan kebijakan mengenai peningkatan Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi sepanjang tahun 2025.

Tahapan Keempat: *Monitoring* dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau *piloting*, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan *monitoring* yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah *monitoring*, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau *piloting*; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil *monitoring* dan evaluasi mengenai Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi sepanjang tahun 2025.

Adapun Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025 terdiri dari: (i) 3 kegiatan pada Triwulan I; (ii) 3 kegiatan pada Triwulan II; (iii) 3 kegiatan pada Triwulan IV; dan (iv) 3 kegiatan pada Triwulan IV.

Formula

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

Nilai Tahapan Pertama = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 20%

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

Nilai Tahapan Kedua = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 25%

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

Nilai Tahapan Ketiga = (Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan/Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan) * 27,5%

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

Nilai Tahapan Keempat = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 27,5%

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan

% efektivitas SKP = Nilai Tahapan Pertama + Nilai Tahapan Kedua + Nilai Tahapan ketiga + Nilai Tahapan keempat.

Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan

Pejabat Penanggung Jawab Data	<div>Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan</div>		
Sumber Data	:	<div>Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan</div>	
Tingkat Kendali IKU	<div> <div>(X) High</div> <div>(...) Moderate</div> <div>(....) Low</div> </div>		
Tingkat Validitas IKU	<div> <div>(X) Exact</div> <div>(...) Proxy</div> <div>(...) Activity</div> </div>		
Jenis Konsolidasi Periode	<div> <div>(...) Sum</div> <div>(...) Average</div> <div>(X) Take Last Known Value</div> </div>		
Jenis Cascading IKU	<div> <div>(X) Cascading Peta</div> <div>(...) Cascading Non Peta</div> <div>(...) Non-Cascading</div> </div>		
Metode Cascading	<div> <div>(...) Direct</div> <div>(X) Indirect</div> </div>		
Polarisasi IKU	:	<div> <div>(X) Maximize</div> <div>(.....) Minimize</div> <div>(...) Stabilize</div> </div>	
Periode Pelaporan	:	<div> <div>(....) Bulanan</div> <div>(X) Triwulanan</div> <div>(....) Semesteran</div> <div>(...) Tahunan</div> </div>	

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: IBP 2.2

Sasaran Kegiatan : SS.2 Terwujudnya Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait Inklusi dan Literasi Keuangan yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden.

Sasaran strategis terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian selain menunjukkan bahwa unit organisasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya juga merupakan sasaran strategis yang memiliki pengaruh pada ketercapaian sasaran strategis "Terwujudnya Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan yang Berkualitas". Dengan kata lain, Kebijakan di Bidang Pengembangan Logistik Nasional yang efektif dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik, serta produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah. Proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan, yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta *Monitoring* dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Peningkatan Inklusi keuangan diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).**

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan, antara lain:

1. Peningkatan Akses Layanan Keuangan Formal dan Digital,
2. Peningkatan Literasi Keuangan dan perlindungan konsumen,
3. Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil,
4. Penyusunan regulasi terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan,

5. Isu-isu lain yang berkembang sepanjang tahun 2025.

Adapun nilai dari persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*).

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir mengenai Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi sepanjang tahun 2025.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat, notula, dan daftar hadir mengenai Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi sepanjang tahun 2025.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan,
- Rumusan perencanaan program,
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rumusan kebijakan mengenai Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi sepanjang tahun 2025.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau *piloting*, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan *monitoring* yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah *monitoring*, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau *piloting*; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil *monitoring* dan evaluasi mengenai Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah, namun disesuaikan juga dengan kondisi proses bisnis yang terjadi sepanjang tahun 2025.

Adapun Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah tahun 2025 terdiri dari: (i) 3 kegiatan pada Triwulan I; (ii) 3 kegiatan pada Triwulan II; (iii) 3 kegiatan pada Triwulan IV; dan (iv) 3 kegiatan pada Triwulan IV.

Formula

6. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

Nilai Tahapan Pertama = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 20%

7. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

Nilai Tahapan Kedua = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 25%

8. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

Nilai Tahapan Ketiga = (Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan/Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan) * 27,5%

9. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

Nilai Tahapan Keempat = (Jumlah Dokumen yang dihasilkan/Jumlah Dokumen yang ditargetkan) * 27,5%

10. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah

% efektivitas SKP = Nilai Tahapan Pertama + Nilai Tahapan Kedua + Nilai Tahapan ketiga + Nilai Tahapan keempat.

Tujuan

Mengukur tingkat keberhasilan dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait intensifikasi, literasi, dan akselerasi produk keuangan syariah sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas

Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan		
Sumber Data	:	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	
Tingkat Kendali IKU	(X.) High	(...) Moderate	(.....) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(...) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	:	(X) Maximize	(.....) Minimize (....) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(....) Bulanan (X) Triwulanan (....)Semesteran (....) Tahunan	

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: C.3.1

Sasaran Kegiatan

SS.3 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Strategis

Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *customer* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Peningkatan Inklusi Keuangan yang mencakup antara lain: (a) tingkat literasi keuangan, (b) intensifikasi, literasi, dan akselerasi produk keuangan syariah, dan (c) penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan

Deskripsi IKU

Definisi

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri dari 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form. Adapun pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas tahun 2025 dilakukan dengan survei kepuasan layanan yang dilakukan tiap semesternya.

Formula

Mengukur Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan} = \frac{\sum \text{Rerata Jawaban dari masing-masing item Survei}}{\text{Jumlah Item Survei}}$$

Tujuan

Mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan Peningkatan Inklusi Keuangan sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Satuan Pengukuran

Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan

Sumber Data

Hasil Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan

Tingkat Kendali IKU

(...) High (x) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU	(x) Exact	(...) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(x) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(x) Cascading Peta	(...) Cascading Non Peta	(...) NonCascading
Metode Cascading	(...) Direct	(x) Indirect	
Polarisasi IKU	(x) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(...) Triwulanan	(X) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	(3 dari 4)	(3 dari 4)	(3 dari 4)	(3 dari 4)	(3 dari 4)	(3 dari 4)	(3 dari 4)
s.d. Triwulan I	-	-	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan II	-	-	(3 dari 4)	(3 dari 4)	(3 dari 4)	(3 dari 4)	(3 dari 4)
s.d. Triwulan III	-	-	-	-	-	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-	(3 dari 4)	(3 dari 4)	(3 dari 4)	(3 dari 4)	(3 dari 4)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: LG.4.1

Sasaran Kegiatan

SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas merupakan sasaran strategis yang berfokus pada Perspektif *Learning and Growth* dan merupakan turunan dari sasaran strategis. Perspektif *Learning and Growth* level kedeputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital yang Berkualitas. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang berkualitas.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan

Deskripsi IKU

Definisi

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan tahun 2025 terdiri dari: (i) 4 kegiatan pada Triwulan I; (ii) 4 kegiatan pada Triwulan II; (iii) 5 kegiatan pada Triwulan IV; dan (iv) 3 kegiatan pada Triwulan IV.

Formula

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Tujuan

Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon II.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Biro Hukum dan Organisasi

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan

Sumber Data

Pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Simersi)

Tingkat Kendali IKU

(X) High (.....) Moderate (.....) Low

Tingkat Validitas IKU

(....) Exact (X) Proxy (.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading

Metode Cascading

(..) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize

(.....) Minimize

(.....) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan

(X) Triwulanan

(....) Semesteran

(....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	85%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIS DEPUTI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU : 1.1

Sasaran Kegiatan : SS 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital yang Baik

Deskripsi Sasaran Kegiatan : Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian Sasaran Kegiatan ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.1.1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital

Deskripsi IKU

:

Definisi

Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi Reformasi Birokrasi diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi Reformasi Birokrasi yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup bukti dukung Implementasi semua kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada Peraturan Menpan-RB terkait Peraturan Menteri PANRB tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2025 dan Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, serta Peraturan turunannya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.

Penilaian kegiatan Reformasi Birokrasi diukur dari pemenuhan bukti dukung sebagai berikut:

No	Indikator	Jenis Bukti Dukung	Jumlah Bukti Dukung	Standar Ketepatan Substansi	Standar Ketepatan Waktu
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	Pemetaan Rencana Aksi RB Tematik 2025	1 Dokumen	Mengacu ND Biro MKKS	Triwulan III
2	Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Dokumen Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	21 Dokumen	Dokumen tertandatangani	Triwulan III
3	Tingkat Maturitas SPIP	1. Dokumen Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP 2. Dokumen matriks Manajemen Risiko	8 Dokumen	Dokumen tertandatangani	1. SPIP : TW II 2. MR : TW III
4	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	1 Dokumen	Mengacu ND Inspektor	Mengacu ND Inspektor
5	Indeks Perencanaan Pembangunan	1. Revisi Renja 2025 2. Usulan Renja 2026 3. Usulan Rancangan	4 Dokumen	Mengacu ND Biro MKKS	1. Revisi Renja 2025: TW II 2. Renja 2026: TW I

		Renstra Kemenko Perekonomian 4. TOR RAB setelah revisi Renja 2025			3. Usulan Renstra: TW II 4. TOR-RAB Revisi: TW III
6	Tingkat Digitalisasi Arsip	Rekap Dokumen dalam Srikandi	12 Dokumen	1. Dokumen terdisposisi 2. Dokumen tertandatang ani	Tanggal 5 bulan berikutnya
7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran	12 Dokumen	1. Uraian program/kegi atan/RO/Ko mponen 2. Pagu 3. Realisasi 4. Sisa anggaran	Tanggal 5 bulan berikutnya
8	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)	Dokumen Hasil Tindaklanjut Laporan Hasil pemantauan SP4N- LAPOR!	2 Dokumen	Mengacu ND Inspektorat	Triwulan II dan IV
9	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Dokumen Bukti Dukung IKK	1 Dokumen	Bukti dukung lengkap sesuai kriteria	Triwulan III
10	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Dokumen pengisian dan pencatatan SIRUP	2 Dokumen	SIRUP terisi lengkap	Triwulan I dan IV
11	Indeks Sistem Merit	1. Dokumen pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN 2. Dokumen usulan formasi ASN	2 Dokumen	Mengacu ND dari Biro Umum	1. E-Kinerja: TW I 2. Usulan Formasi: TW IV
12	Capaian IKU	Laporan Kinerja Triwulanan	4 Dokumen	1. Ringkasan Kinerja Triwulanan 2. Narasi setiap IKU a. Latar belakang b. Hasil pengukuran kinerja c. Pelaksanaan Rencana Aksi triwulanan, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya d. Kendala dan upaya perbaikan pencapaian target	Mengacu pada ND Kepala Biro MKKS
13	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan)	Dokumen Pendukung pemeriksaan BPK	1 Dokumen	Mengacu ND dari Inspektorat	Triwulan II Tahun berikutnya

14.	Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan)	Dokumen hasil rekomendasi BPK	1 Dokumen	Mengacu ND dari Inspektorat	Triwulan II dan IV
15	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Dokumen Usulan data responden Internal dan Eksternal	1 Dokumen	Mengacu ND dari Inspektorat	Triwulan II
16	Indeks BerAKHLAK	Dokumen Usulan Agen Perubahan	1 Dokumen	Mengacu ND dari Biro Hukum dan Organisasi	Triwulan II
Total			54 Dokumen		

Adapun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital tahun 2025 terdiri dari: (i) 10 kegiatan pada Triwulan I; (ii) 13 kegiatan pada Triwulan II; (iii) 13 kegiatan pada Triwulan III; dan (iv) 15 kegiatan pada Triwulan IV.

Formula

Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung RB General dan RB Tematik yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital:

$$\text{Tingkat implementasi RB} = \frac{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Tujuan

Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja Eselon II.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Pejabat Penanggung Jawab Data

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Sumber Data

: Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Tingkat Kendali IKU

(X) High (.....) Moderate (....) Low

Tingkat Validitas IKU

(...) Exact (X) Proxy (.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading

Metode Cascading

(.....) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

: (X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

: (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	100%	N/A
s.d. Triwulan I	25%	N/A
s.d. Triwulan II	50%	N/A
s.d. Triwulan III	75%	N/A
s.d. Triwulan IV	100%	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIS DEPUTI

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU : 1.2

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital yang Baik

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian Sasaran Kegiatan ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.1.2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital

Deskripsi IKU

Definisi

Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi tata kelola diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan tata kelola di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi tata kelola yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diadarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Implementasi tata kelola diukur dari data dukung dokumen tata kelola meliputi dokumen keuangan, sistem pengendalian internal, data dan informasi, organisasi, tata laksana dan SDM, BMN, kearsipan, humas, protokol, persidangan, naskah pimpinan, hukum, dan SOP. Adapun waktu dan format akan diatur lebih lanjut melalui nota dinas Kepala Biro yang akan mengampu dokumen dimaksud.

Penilaian kegiatan Tata Kelola diukur dari pemenuhan bukti dukung sebagai berikut:

N o	Tata Kelola	Jenis Bukti Dukung	Jumlah Bukti Dukung	Standar Substansi	Standar Ketepatan Waktu
1.	Keuangan	1. TOR dan RAB 2. ND Revisi POK 3. Monitoring Realisasi Anggaran	1. 6 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 4 Dokumen	1. Latar Belakang, Penerima Manfaat, Strategi Pencapaian Keluaran, Biaya yang Dibutuhkan 2. Usulan Penyesuaian Akun Anggaran, Alasan revisi berdasarkan IKU 3. Uraian program/kegiatan/RO/Komponen, Pagu, Realisasi, Sisa anggaran	1. Pertengahan tahun untuk tahun berikutnya 2. Tanggal 25 setiap bulan 3. Tanggal 5 bulan berikutnya
2.	Sistem Pengendalian Internal	1. Kertas Kerja Manajemen Risiko 2. Kertas Kerja SPIP	1. 7 Dokumen 2. 1 Dokumen	1. Form Konteks, Form Profil & Peta Risiko, Form	1. Mengacu pada ND Inspektur 2. Mengacu pada ND Inspektur

				Mitigasi Risiko, 2. Perka BPKP 5/2021	
3.	Tata Laksana dan SDM	1. ND Usulan Kenaikan Pangkat 2. ND Usulan Kenaikan Jenjang 3. ND Usulan Pendidikan dan Pelatihan	1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen	1. Data Pegawai, Dokumen Pendukung 2. Data Pegawai, Dokumen Pendukung 3. Data Pegawai, Dokumen Pendukung	1. Setiap 2 Bulan 2. Mengacu pada ND Kepala Biro Umum dan SDM 3. Mengacu pada ND Kepala Biro Umum dan SDM
4.	Barang Milik Negara	ND Rencana Kebutuhan BMN	1 Dokumen	Jumlah Kebutuhan, Tahun Anggaran	Mengacu pada ND Kepala Biro Umum dan SDM (Akhir Tahun untuk 2 Tahun Berikutnya)
5.	Kearsipan	Rekap Dokumen dalam Srikandi	12 Rekap Dokumen	1. Dokumen terdisposisi 2. Dokumen tertandatangan 3. Pemberkas an	Tanggal 5 bulan berikutnya
6.	Pengelolaan data dan informasi	Media informasi	2 Dokumen	1. Laporan Perkembangan Ekonomi 2. Kegiatan Kedeputian	1. 3 hari setelah rilis data BPS 2. 3 hari setelah kegiatan
7.	Naskah Pimpinan	Bahan Sambutan/Key note/Presentasi Pimpinan	4 Dokumen	Update isu strategis dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan	H-3 pelaksanaan Apel Pagi
8.	Standar Operasional Prosedur	1. Dokumen SOP Dialog Kinerja 2. Dokumen SOP Administrasi Keuangan 3. Dokumen <i>Reward and Punishment</i>	1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen	1. Diagram Alur Dialog Kinerja 2. Diagram Alur Administrasi Keuangan 3. Diagram Alur <i>Reward and Punishment</i>	1. Awal Tahun Anggaran 2. Awal Tahun Anggaran 3. Awal Tahun Anggaran
Total			44 Dokumen		

Formula

Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital:

$$\text{Tingkat Implementasi Tata Kelola} = \frac{\text{Total Bukti Dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung Tata Kelola yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Tujuan

Tujuan dari IKU ini adalah untuk memastikan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital telah mendukung penciptaan budaya kerja yang efektif

Satuan Pengukuran		Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data		Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Pejabat Penanggung Jawab Data		Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Sumber Data	:	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Tingkat Kendali IKU		(X) High (...) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU		(...) Exact (X) Proxy (.....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode		(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU		(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading		(....) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	:	(X) Maximize (....) Minimize (.....) Stabilize
Periode Pelaporan	:	(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	100%	N/A
s.d. Triwulan I	25%	N/A
s.d. Triwulan II	50%	N/A
s.d. Triwulan III	75%	N/A
s.d. Triwulan IV	100%	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIS DEPUTI

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU : 1.3

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital yang Baik

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian Sasaran Kegiatan ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.1.3. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital

Deskripsi IKU :

Definisi

Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan ukuran yang menggambarkan efektivitas perencanaan unit kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan perencanaan di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan Tingkat Efektivitas Perencanaan yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dari data dukung dokumen perencanaan meliputi dokumen:

1. Rencana Strategis (Renstra) Deputy, paling lambat harus disahkan 5 (lima) bulan setelah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) disahkan. Adapun standar penyusunan mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
2. Rencana Kerja (Renja), paling lambat harus selesai bulan juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
3. Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi, paling lambat harus ditetapkan pada akhir januari tahun berjalan. Adapun standar penyusunan dokumen ini mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. TOR RAB, paling lambat harus selesai bulan juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), paling lambat akhir februari. Adapun Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dari data dukung dokumen perencanaan meliputi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputy, Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi, TOR RAB, dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Penilaian kegiatan Perencanaan diukur dari pemenuhan bukti dukung sebagai berikut:

No	Perencanaan	Jumlah Dokumen	Standar Substansi	Standar Ketepatan Waktu
1.	Rencana Strategis (Renstra) Deputy	1 Dokumen	1. Pendahuluan 2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis	Triwulan I 2025

			3. Arah Kebijakan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5. Penutup dan Lampiran (Permen PPN/Bappenas 10/2023)	
2.	Perjanjian Kinerja	7 Dokumen	<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>	2 Januari 2025
3.	Manual IKU	7 Dokumen	<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>	2 Januari 2025
4.	Rencana Aksi	7 Dokumen	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, Target, Inisiatif Strategis, Rencana Aksi Kinerja	2 Januari 2025
5.	TOR dan RAB	6 Dokumen	Latar Belakang, Penerima Manfaat, Strategi Pencapaian Keluaran, Biaya yang Dibutuhkan	Pertengahan tahun untuk tahun berikutnya
6.	Sasaran Kinerja Pegawai	1 Paket Dokumen	1. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi 2. Rencana hasil kerja 3. Aspek 4. Indikator kinerja individu 5. Target	2 Januari 2025
	Jumlah	29 Dokumen		

Formula
<p>Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Perencanaan yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital:</p> $\text{Tingkat Efektivitas Perencanaan} = \frac{\text{Total Bukti Dukung Perencanaan yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung Perencanaan yang dihasilkan}} \times 100\%$
Tujuan
Untuk mengukur tingkat efektivitas perencanaan yang baik di unit kerja Eselon I.

Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Sumber Data	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Tingkat Kendali IKU	(X) High (....) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact (X) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(....) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (X) Non-Cascading
Metode Cascading	(....) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	100%	N/A
s.d. Triwulan I	25%	N/A
s.d. Triwulan II	50%	N/A
s.d. Triwulan III	75%	N/A
s.d. Triwulan IV	100%	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIS DEPUTI

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU : 1.4

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital yang Baik

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian Sasaran Kegiatan ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.1.4. Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital

Deskripsi IKU

Definisi

Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja dapat memenuhi kewajiban penyampaian laporan nya secara tepat waktu, lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketaatan ini dinilai berdasarkan 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu. Adapun standar laporan yang diacu adalah Peraturan Menpan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun ruang lingkup laporan yang termasuk pada indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Triwulan I s.d IV (10 hari kerja setelah triwulan berakhir);
2. E-Monev (2 hari kerja pada tiap bulan);
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (akhir februari pada tahun berjalan); dan
4. Laporan SKP Triwulan I s.d IV (minggu terakhir pada bulan ke 4,7,10 dan 12).

Laporan dikatakan memenuhi standar jika memenuhi standar substansi dan standar ketepatan waktu dengan rincian sebagai berikut:

No	Laporan	Jumlah Laporan	Standar Substansi	Standar Ketepatan Waktu
1	Laporan Kinerja Triwulan I s.d IV	4 Dokumen	<ol style="list-style-type: none">1. Ringkasan Kinerja Triwulanan2. Narasi setiap IKU<ol style="list-style-type: none">a. Latar belakangb. Hasil pengukuran kinerjac. Pelaksanaan Rencana Aksi triwulanan, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Dayad. Kendala dan upaya perbaikan pencapaian target	Mengacu pada ND Kepala Biro MKKS
2	E-Monev	4 Dokumen	<ol style="list-style-type: none">1. Pemantauan komponen<ol style="list-style-type: none">a. Status pelaksanaanb. Realisasi fisikc. Realisasi anggaran	Setiap triwulan

			2. Pemantauan rincian output Renja a. Status pelaksanaan b. Realisasi fisik c. Realisasi anggaran	
3	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	1. Daftar isi 2. Peristiwa penting tahun laporan 3. Ringkasan eksekutif 4. Bab I : Pendahuluan 5. Bab II : Perencanaan kinerja 6. Bab III : Akuntabilitas Kinerja 7. Bab IV : Evaluasi dan kinerja 8. Bab V : Kesimpulan dan penutup	Akhir Februari pada tahun berikutnya
4	Laporan Penilaian SKP Triwulan I s.d IV	4 Paket Dokumen	1. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi 2. Rencana hasil kerja 3. Aspek 4. Indikator kinerja individu 5. Target 6. Realisasi berdasarkan bukti dukung 7. Umpan balik berdasarkan bukti dukung	Minggu terakhir pada bulan ke 4,7,10 dan 12
	Jumlah	13 Dokumen		

Formula

Adapun formula perhitungan indikator Tingkat Ketaatan pelaporan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total laporan yang memenuhi standar ketaatan}}{\text{Total laporan yang disusun}} \times 100\%$$

Tujuan

Tujuan dari IKU ini adalah untuk memastikan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital telah mendukung penciptaan budaya kerja yang transparans dan akuntabel melalui pelaporan secara tepat waktu dan sesuai dengan stamdar yang diberikan oleh unit pengampu

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital

Pejabat Penanggung Jawab Data

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital

Sumber Data

Laporan Kinerja

Tingkat Kendali IKU

(X) High (....) Moderate (....) Low

Tingkat Validitas IKU

(...) Exact (X) Proxy (....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(....) Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (X) Non-Cascading

Metode Cascading

(....) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

:

(X) Maximize

(....) Minimize

(....) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(....) Bulanan

(X) Triwulanan

(....) Semesteran

(....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	100%	N/A
s.d. Triwulan I	25%	N/A
s.d. Triwulan II	50%	N/A
s.d. Triwulan III	75%	N/A
s.d. Triwulan IV	100%	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIS DEPUTI

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU : 1.5

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital yang Baik													
Deskripsi Sasaran Kegiatan		Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian Sasaran Kegiatan ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.													
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital													
Deskripsi IKU	:	<table><tr><td>Definisi</td></tr><tr><td>Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 tahun 2024 tentang Organsasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamanatkan Sekretaris Deputy untuk dapat menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh Deputy. Penugasan ini dapat bersifat tata kelola dan substantif yang bersifat lintas keasdepan. Khusus untuk penugasan yang bersifat substantif, Sekretaris Deputy bertanggung jawab untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terhadap isu-isu strategis yang menjadi fokus kedeputian.</td></tr><tr><td>Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital pada tahun ini mengawal isu – isu strategis kedeputian yang meliputi :</td></tr><tr><td><div>1. Koordinasi kebijakan peningkatan belanja dalam negeri, dikerjakan bersama Asdep Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga;</div><div>2. Koordinasi kebijakan terhadap hambatan ekspor/impor, dikerjakan bersama Asdep Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor;</div><div>3. Koordinasi penguatan kolaborasi pengelola jasa logistik, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik;</div><div>4. Koordinasi penyusunan dashboard logistik nasional, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik;</div><div>5. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan data analitik, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Ekonomi Digital;</div><div>6. Koordinasi kebijakan penyusunan paket regulasi, dikerjakan bersama bersama Asdep Pengembangan Logistik dan Asdep Peningkatan Inklusi Keuangan.</div></td></tr><tr><td>Adapun kriteria isu-isu strategis selesai apabila apabila :</td></tr><tr><td>(1) Isu Strategis telah ditindaklanjuti oleh Pihak terkait;</td></tr><tr><td>(2) Hasil penyelesaian telah dikonfirmasi oleh Kedeputian;</td></tr><tr><td>dan (3) Dokumen penyelesaian dari isu – isu strategis tersedia serta terverifikasi.</td></tr><tr><td>Formula</td></tr><tr><td>Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian isu-isu strategis adalah sebagai berikut:</td></tr><tr><td><div><div>Total Isu – Isu Strategis yang Diselesaikan</div><div>Total Isu Strategis yang ditetapkan</div><div>x 100%</div></div></td></tr><tr><td>Tujuan</td></tr><tr><td>Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengawal dan memastikan bahwan isu – isu strategis yang menjadi prioritas utama Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital dapat terselesaikan dengan baik</td></tr></table>	Definisi	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 tahun 2024 tentang Organsasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamanatkan Sekretaris Deputy untuk dapat menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh Deputy. Penugasan ini dapat bersifat tata kelola dan substantif yang bersifat lintas keasdepan. Khusus untuk penugasan yang bersifat substantif, Sekretaris Deputy bertanggung jawab untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terhadap isu-isu strategis yang menjadi fokus kedeputian.	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital pada tahun ini mengawal isu – isu strategis kedeputian yang meliputi :	<div>1. Koordinasi kebijakan peningkatan belanja dalam negeri, dikerjakan bersama Asdep Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga;</div> <div>2. Koordinasi kebijakan terhadap hambatan ekspor/impor, dikerjakan bersama Asdep Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor;</div> <div>3. Koordinasi penguatan kolaborasi pengelola jasa logistik, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik;</div> <div>4. Koordinasi penyusunan dashboard logistik nasional, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik;</div> <div>5. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan data analitik, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Ekonomi Digital;</div> <div>6. Koordinasi kebijakan penyusunan paket regulasi, dikerjakan bersama bersama Asdep Pengembangan Logistik dan Asdep Peningkatan Inklusi Keuangan.</div>	Adapun kriteria isu-isu strategis selesai apabila apabila :	(1) Isu Strategis telah ditindaklanjuti oleh Pihak terkait;	(2) Hasil penyelesaian telah dikonfirmasi oleh Kedeputian;	dan (3) Dokumen penyelesaian dari isu – isu strategis tersedia serta terverifikasi.	Formula	Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian isu-isu strategis adalah sebagai berikut:	<div><div>Total Isu – Isu Strategis yang Diselesaikan</div><div>Total Isu Strategis yang ditetapkan</div><div>x 100%</div></div>	Tujuan	Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengawal dan memastikan bahwan isu – isu strategis yang menjadi prioritas utama Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital dapat terselesaikan dengan baik
Definisi															
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 tahun 2024 tentang Organsasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamanatkan Sekretaris Deputy untuk dapat menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh Deputy. Penugasan ini dapat bersifat tata kelola dan substantif yang bersifat lintas keasdepan. Khusus untuk penugasan yang bersifat substantif, Sekretaris Deputy bertanggung jawab untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terhadap isu-isu strategis yang menjadi fokus kedeputian.															
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital pada tahun ini mengawal isu – isu strategis kedeputian yang meliputi :															
<div>1. Koordinasi kebijakan peningkatan belanja dalam negeri, dikerjakan bersama Asdep Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga;</div> <div>2. Koordinasi kebijakan terhadap hambatan ekspor/impor, dikerjakan bersama Asdep Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor;</div> <div>3. Koordinasi penguatan kolaborasi pengelola jasa logistik, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik;</div> <div>4. Koordinasi penyusunan dashboard logistik nasional, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik;</div> <div>5. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan data analitik, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Ekonomi Digital;</div> <div>6. Koordinasi kebijakan penyusunan paket regulasi, dikerjakan bersama bersama Asdep Pengembangan Logistik dan Asdep Peningkatan Inklusi Keuangan.</div>															
Adapun kriteria isu-isu strategis selesai apabila apabila :															
(1) Isu Strategis telah ditindaklanjuti oleh Pihak terkait;															
(2) Hasil penyelesaian telah dikonfirmasi oleh Kedeputian;															
dan (3) Dokumen penyelesaian dari isu – isu strategis tersedia serta terverifikasi.															
Formula															
Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian isu-isu strategis adalah sebagai berikut:															
<div><div>Total Isu – Isu Strategis yang Diselesaikan</div><div>Total Isu Strategis yang ditetapkan</div><div>x 100%</div></div>															
Tujuan															
Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengawal dan memastikan bahwan isu – isu strategis yang menjadi prioritas utama Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital dapat terselesaikan dengan baik															
Satuan Pengukuran		Persentase													
Unit/Pihak Penyedia Data		Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital													
Pejabat Penanggung Jawab Data		Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital													
Sumber Data	:	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital													
Tingkat Kendali IKU		(X) High (.....) Moderate (....) Low													
Tingkat Validitas IKU		(...) Exact (X) Proxy (.....) Activity													
Jenis Konsolidasi Periode		(.....) Sum (.....) Average (X) Take Last Known Value													

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (.....) Non-Cascading

Metode Cascading

(....) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

:

(X) Maximize (.....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	100%	N/A
s.d. Triwulan I	25%	N/A
s.d. Triwulan II	50%	N/A
s.d. Triwulan III	75%	N/A
s.d. Triwulan IV	100%	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIS DEPUTI

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: S.1.6

Sasaran Kegiatan	SS.1. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital yang baik
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian Sasaran Kegiatan ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital
Deskripsi IKU	<div> <div>Definisi</div> <p>Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Unit kerja melakukan pembangunan zona integritas yang nantinya akan dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Komponen penilaian pembangunan Zona Integritas terdiri dari: (Komponen dan kriteria dapat berubah mengikuti peraturan yang berlaku)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Komponen Pengungkit Zona Integritas dengan kriteria nilai minimal 42,75 2. Nilai Komponen Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dengan kriteria nilai minimal 3,6 3. Nilai Komponen Hasil Subkomponen Hasil "Kinerja lebih baik" dengan kriteria nilai minimal 2,5 4. Nilai Komponen Hasil Survei Pelayanan Publik yang Prima dengan kriteria nilai minimal 3,2 <div>Formula</div> <p>Rumus Perhitungan :</p> $\left(\frac{\text{Realisasi Komponen Penilaian 1}}{\text{Nilai Minimum Komponen Penilaian 1}} \right) + \dots + \left(\frac{\text{Realisasi Komponen Penilaian ke-n}}{\text{Nilai Minimum Komponen Penilaian ke-n}} \right) \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><i>Jumlah Seluruh Komponen</i></p> <div>Tujuan</div> <p>Tujuan pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas adalah untuk mengetahui tingkat pembangunan ZI di lingkungan unit kerja untuk mewujudkan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik</p> </div>
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat
Pejabat Penanggung Jawab Data	Inspektur
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi ZI
Tingkat Kendali IKU	(X) High (....) Moderate (....) Low
Tingkat Validitas IKU	(....) Exact (X) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading
Metode Cascading	(....) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan (...) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	85%	N/A
s.d. Triwulan I	-	N/A
s.d. Triwulan II	-	N/A
s.d. Triwulan III	-	N/A
s.d. Triwulan IV	85%	N/A

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIS DEPUTI

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

KODE IKU: S.1.7

Sasaran Kegiatan

SS.1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital yang baik

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian Sasaran Kegiatan ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU.1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital

Deskripsi IKU

Definisi

Layanan Sekretaris Deputy adalah layanan yang diberikan oleh Sekretaris Deputy kepada Kedeputian untuk melaksanakan tugas koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital

Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam :

1. Perencanaan, program dan anggaran;
2. Pengelolaan kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Pengelolaan sistem pengendalian internal;
4. Pengelolaan data dan sistem informasi;
5. Pengelolaan penataan organisasi, tata laksana, dan SDM;
6. Pengelolaan BMN;
7. Penataan kearsipan dan persuratan;
8. Pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan naskah pimpinan, dan administrasi;
9. Pemantauan, analisis dan evaluasi pengelolaan keuangan;
10. Pemantauan, evaluasi, dan laporan program kegiatan dan tata kelola; dan
11. Pelaksanaan fungsi lainnya

Indikator kepuasan layanan Sekretaris Deputy mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Sesdep kepada Kedeputian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Deputy. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu :

1. **Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*);**
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan
2. **Aspek Keandalan dalam layanan (*Reability*);**
Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan
3. **Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);**
Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan
4. **Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*);**
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman
5. **Aspek Sikap dalam Layanan (*Empathy*)**
Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

1. Sangat Tidak Puas
2. Tidak Puas
3. Puas
4. Sangat Puas

Formula

Indikator Kinerja Utama Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputy diukur melalui Survei Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital. Daftar pertanyaan survei terdiri dari beberapa pertanyaan berupa 5 (lima) jenis aspek layanan yang telah diberikan oleh Sesdep kepada Deputy. Jumlah responden dipilih secara acak/random dan berasal dari unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital.

Rumus Perhitungan :

$$\frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing – masing item survei}}{\text{Jumlah Item Survei}}$$

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Tujuan

Tujuan dari IKU ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif terkait kinerja Sekretaris Deputy dalam penyelenggaraan layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Satuan Pengukuran

Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Pejabat Penanggung Jawab Data

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy

Tingkat Kendali IKU

(X) High (....) Moderate (....) Low

Tingkat Validitas IKU

(....) Exact (X) Proxy (....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(....) Sum (X) Average (....) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(...) Cascading Peta (....) Cascading Non Peta (X) Non-Cascading

Metode Cascading

(....) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize

Periode Pelaporan

(....) Bulanan (...) Triwulanan (X) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	3 dari 4	N/A
s.d. Triwulan I	-	N/A
s.d. Triwulan II	3 dari 4	N/A
s.d. Triwulan III	-	N/A
s.d. Triwulan IV	3 dari 4	N/A